

**PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA OLEH PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN
KONSTITUSI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

MUHAMMAD HARDIANSYAH KUSUMA

NPM: 1521020047

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440H /2019 M**

**PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA OLEH PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN
KONSTITUSI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440H / 2019 M**

ABSTRAK

PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA

Oleh

Muhammad Hardiansyah Kusuma

Dalam kehidupan sekarang ini Islam menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Salah satunya adalah terdapatnya Organisasi Masyarakat Islam yang menuai kontroversi. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis Organisasi Masyarakat berbasis Islam, yaitu yang pertama Nahdatul Ulama Organisasi ini adalah yang paling banyak di ikuti oleh masyarakat Indonesia, yang kedua Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, FPI, Hizbut Tahrir Indonesia dan masih banyak yang lainnya. Akan tetapi masih hangat dalam ingatan kita mengenai pembubaran Organisasi Masyarakat berbasis Islam Hizbut Tahrir Indonesia pada tanggal 17 Juli 2017 lalu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengubah atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana pandangan Hukum Islam serta proses pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan pandangan para tokoh? (2). Bagaimana pandangan konstitusi Indonesia dan peraturan di Indonesia terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari beberapa peraturan Perundang-Undangan dengan pokok permasalahan yang terkait dengan permasalahan ini yang selanjutnya dijadikan bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku atau karya ilmiah terdahulu untuk mencari teori-teori dan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Adapun bentuk analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode komparasi yaitu dengan membandingkan persamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau ide-ide.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa Hizbut Tahrir Indonesia adalah Organisasi Islam yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia hal itu yang menjadi alasan pemerintah membubarkan Organisasi Masyarakat ini yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Proses dari pembubaran Ormas ini melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mencabut status badan hukum yang sudah dimiliki kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari pencabutan status badan hukum yang dimiliki oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Pembubaran dari Organisasi Masyarakat ini sah secara hukum, baik secara hukum Islam maupun konstitusi Negara Indonesia berdasarkan Pasal 80 A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017. Hukum Islam memandang sebuah kebijakan yang diambil pemimpin dan pemerintah dalam menetapkan kebijakan harus mengedepankan kemaslahatan bagi rakyatnya, pembubaran Organisasi Masyarakat ini dalam pandangan konstitusi Indonesia sah secara hukum berdasarkan Pasal 80 A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : **MUHAMMAD HARDIANSYAH KUSUMA**
NPM : **1521020047**
Program Studi : **Hukum Tatanegara**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul Skripsi : **PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA OLEH
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI
INDONESIA**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Klamayah, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197609011997031002

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag.M.H.I
NIP. 197409202003121003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA** Disusun oleh:
**Muhammad Hardiansyah Kusuma, NPM: 1521020047, Program Studi:
Hukum Tatanegara, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2019**

DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag. (.....)



**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النِّسَاء: ٥٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisaa: 59)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah :Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 78.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayah Kusman dan Ibu Halimah yang tak henti-hentinya mendo'akan yang terbaik untuk penulis dan tak bosan-bosannya selalu memotivasi serta memberi nasehat kepada penulis dan memberikan dukungan yang begitu besar untuk dapat menyelesaikan pendidikan Srata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang tercinta ini.
2. Adik-adik tersayang Muhammad Habibullah Yasin dan Muhammad Bintang Saputra yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Sanak saudara, sepupu serta keluarga besar pihak Ayah dan Ibu yang selalu memberi dukungan agar penulis agar dapat menjadi suri tauladan yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga besar di kemudian hari.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah membesarkan penulis menjadi mahasiswa yang edukatif, sosial dan relegius.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Hardiansyah Kusuma, dilahirkan pada tanggal 19 November 1996 di Desa Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh seorang Ibu yang bernama Halimah dan Ayah yang bernama Kusman.

Pendidikan penulis dimulai SD Negeri 02 Purajaya Kecamatan Kebun Tebu dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 01 Kebun Tebu dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke MAN 1 Lampung Selatan selesai pada tahun 2015. Syukur Alhamdulillah, pada tahun yang sama penulis dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi S1 di UIN Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Organisasi menjadi perhal yang penting bagi penulis untuk menambah wawasan keorganisasian diluar pendidikan perkuliahan. Salah satu organisasi internal kampus yang pernah diikuti penulis adalah UKM Photography Blitz UIN Raden Intan Lampung dan penulis dipercaya untuk menjadi ketua umum organisasi tersebut pada tahun 2018. Penulis juga pernah aktif di organisasi ekstra kampus yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang rasul pembawa risalah kebenaran bagi seluruh umat manusia.

Karya tulis ilmiah ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, bimbingan, motivasi, serta kritik guna mempersembahkan karya tulis yang lebih baik sangat diharapkan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag ,selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

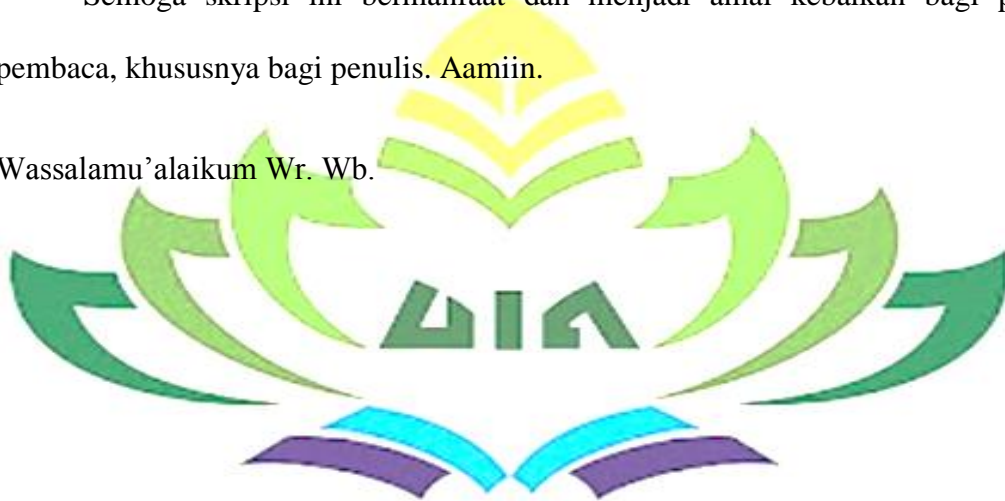
4. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing 1 penulis yang telah membimbing, memberi arahan kepada penulis dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. H. Rohmat, S.Ag. M.H.I, selaku pembimbing II yang telah membimbing sejak awal perkuliahan dan banyak memberi motivasi, nasehat, serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Seluruh karyawan dan staf perpustakaan yang telah merawat buku serta memberikan pelayanan terbaik.
8. Sahabat AmPm 12 Hendy Yuza Libel, Ibnu Ramanda Pratama, Moh Faqih Priagung, Samube Beye Arlo, Zainul Makhabi yang telah memberi dukungan serta berbagi canda tawa semoga diberikan keberkahan dan kesuksesan di masa mendatang. Aamiin.
9. Sahabat Semendenesia, Ahmad Zulfikar, S.H dan Yovi Alkausar yang telah saling berbagi suka dan duka serta meluangkan waktu dalam canda dan tawa semoga diberikan keberkahan dan kesuksesan di masa mendatang. Aamiin.
10. Sahabat Twelve, Adjie Arvindo, Ali Khoironi, Estiyana, Gustian Ari Pranomo, M Saefudin, Rizky Setiawan, Pratama Argo Putra, Witiar Pramudita, Wahyudi Rahmat, yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis semoga diberikan keberkahan dan kesuksesan di masa mendatang. Aamiin.
11. Keluarga besar UKM Photography Blitz UIN Raden Intan Lampung.

12. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2015 khususnya kelas D, Muvita, Alfhi, Desi, Beby, Maisya, Inas, Kartika, Diara, Diah, Raka, Alfieyan, dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya semua satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.

13. Kawan-kawan KKN 54 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan kenangan terbaik selama KKN.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Bandar Lampung, 19 Juli 2019

Muhammad Hardiansyah Kusuma

1521020047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK.....	..ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHANv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	.x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
F. Metode penelitian.....	16
BAB II ORMAS DALAM HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA	
A. Pengertian Ormas dan Dasar Hukumnya	20
B. Syarat Berdirinya Ormas.....	24
C. Prinsip-Prinsip dan Kaidah Pokok Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Aturan Organisasi.....	26
D. Larangan-Larangan Terhadap Ormas dalam Pandangan Hukum Islam dan Kostitusi.....	30
BAB III HIZBUT TAHRIR DI INDONESIA DAN PEMBUBARANNYA	

A. Sejarah Hizbut Tahrir Di Dunia dan Indonesia	38
B. Ideologi-Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia	50
C. Ajaran Politik Hizbut Tahrir.	54
D. Geraka-Gerakan Politik HTI di Indonesia	59
E. Proses Pembubaran HTI dan Dasar Hukumnya.....	62

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pandangan Hukum Islam dan Proses Pembubaran HTI di Indonesia dan Pandangan Para Tokoh	72
B. Pandangan Konstitusi dan Peraturan di Indonesia Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahan pemahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka akan di uraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi **“PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIAOLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA”** yaitu sebagai berikut :

1. Pembubaran

Pembubaran menurut “*Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata “bubar” yaitu bercerai-cerai ke mana-mana (tentang orang ramai yang berkumpul). “Sedangkan pembubaran sendiri adalah proses, cara dan perbuatan membubarkan”.²Pembubaran juga adalah upaya atau perbuatan yang dilakukan guna melepas suatu status legal.

2. Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia adalah organisasi politik pan-Islamis, yang menganggap ideologinya sebagai ideologi islam yang tujuannya membentuk “’Khilafah Islam’” atau negara Islam. Kekhalifahan baru akan menyatukan komunitas Muslim (Ummah) dalam negara kesatuan bukan (federal) dari negara-negara mayoritas muslim.³

1.Departemen pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 213.

³Hizbut Tahrir Indonesia” (On-Line), tersedia di:
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/HizbutTahrir> (15 Mei 2019).

3. Pemerintah

“Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴

4. Hukum Islam

Secara klasik hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Tuhan dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Pemahaman ini merujuk kepada istilah fiqh dalam arti produk hukum sistematis yang disusun manusia berdasarkan sumber utama ajaran Islam. Dikalangan pemikir Muslim, Imam al-Ghazali berpandangan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memasrahkan diri pada tuhan. Hukum memasrahkan diri kepada tuhan dapat disebut sebagai hukum alami dan bukan hukum insani. Hukum alami (*Phisika*) dapat ditemukan oleh ahli-ahli ilmu alam, dan hukum insani dapat ditemukan oleh para filsuf moral.⁵

5. Konstitusi

Mengenai istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu *consituer* ,berarti membentuk. Yang dimaksud

⁴Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 ayat (4).

⁵ Ahmad Hasan Ridwan “ Implikasi Hermeneutika dalam Reinterpretasi Teks-teks Hukum Islam”, (Jurnal Al-Adalah Vol. XIII, No. 1 Oleh UIN Raden Intan Lampung, Juni 2016), h. 96 (On-line), tersediadi <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, (19 April 2019, 18:37), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara.⁶ Pengertian konstitusi dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non hukum”.⁷

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu kajian yang menjelaskan tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pandangan hukum Islam dan konstitusi Indonesia, serta mengetahui apa saja alasan pemerintah dan pandangan para tokoh tentang pembubaran organisasi masyarakat ini.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal yang memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA, yaitu:

1. Alasan Objektif

Banyaknya organisasi masyarakat di Indonesia yang berbasis Islam, dan salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia yang menginginkan bentuk pemerintahan negara dalam bentuk khilafah. Oleh

⁶ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi* (Bandung: Yapemdo, 2000), h. 17.

⁷ A. Himmawan Utomo, “Konstitusi”, *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 2.

karena itu hal tersebut bertentangan dengan Indonesia yang sistem pemerintahannya mengakomodasi sistem demokrasi dengan bentuk negara republik yang berideologikan Pancasila sebagai dasar negara.

2. Alasan Subjektif

- a. Data yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan tepat pada waktunya.
- b. Masalah yang di bahas dalam penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji penulis pada program studi Hukum Tata Negara

C. Latar Belakang Masalah

Pasca jatuhnya kerajaan Islam terakhir, Turki Utsmani, pada abad ke-19 M, penjajahan Barat mulai memasuki wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Isu negara bangsa dengan tingkat keberagaman penduduk mulai banyak digulirkan oleh beberapa kalangan. Bahkan terjadinya dinamika seperti ini menuntut para negarawan dan pemuka agama untuk merumuskan kembali system ketatanegaraan yang sesuai dengan semangat perubahan. Berbagai tantangan dan harapan pun ikut mendorong mereka agar mencari penyelesaian, baik secara politis maupun akademis. Lalu, system *syura* atau demokrasi yang pernah tersemat pada periode pemerintahan keempat khalifah (*al-khulafa' ar-rasyidin*) kembali di hembuskan dalam dalam berbagai forum dan kesempatan.⁸

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberagaman penduduk yang sangat tinggi ikut mewacanakan bentuk dan dasar negara yang hendak

⁸ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017).h. 21.

dirumuskan. Setelah merdeka dari kungkungan penjajah pada tahun 1945, para pemuka dan *founding father* republik ini sepakat bahwa sistem pemerintahan yang akan digunakan adalah demokrasi, sementara Pancasila menjadi dasar dan ideology dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut As'ad Said Ali, Ketua Tanfidziyah PBNU, Pancasila merupakan suatu consensus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis.⁹

Ide pemikiran politik yang terkandung dalam Pancasila merupakan racikan sempurna yang dapat memberikan solusi bagi terwujudnya negara demokrasi dengan segmen penduduk yang sangat majemuk. Para pendiri negeri ini mampu meramunya dengan sangat kreatif. Mereka mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrem: negara sekuler atau negara agama. Mereka menyusunnya dengan rumusan imajinatif, yakni negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Para pendiri negara kita dengan amat cemerlang mampu menyepakati pilihan yang tepat tentang dasar negara sesuai dengan karakter bangsa. Pilihan mereka sangat orisinil sehingga Indonesia menjadi sebuah negara modern yang berkarakter religious. Rumusan konsepsinya benar-benar diorientasikan sesuai karakter bangsa. Mereka bukan hanya mampu menyingkirkan pengaruh gagasan negara patrimonial yang mewarnai sepanjang sejarah Nusantara pra-kolonial, tetapi juga mampu meramu berbagai pemikiran politik yang berkembang saat itu secara kreatif, sesuai kebutuhan masadepan modern abnak bangsa.

⁹*Ibid*, h. 22.

¹⁰*Ibid*

Kehadiran negara dalam pandangan Islam bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan (*wasilah*). Tujuan berdirinya sebuah negara ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara lahir batin, baik di dunia maupun akhirat. Dengan ungkapan lain, kehadiran negara harus mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berkebutuhan. Karena posisi negara ialah sebagai instrumen atau sarana maka menjadi masuk akal jika dalam teks wahyu, bentuk negara dan sistem pemerintahan tidak disebutkan secara tersurat dan terperinci, melainkan teks wahyu dalam soal ini banyak mengemukakan secara garis besar dan universal, sehingga umat bisa merumuskan sistem pemerintahan yang sesuai dengan jenis tantangan yang dihadapi dan ragam dinamika yang terjadi. Teks wahyu banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro dan universal. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip umum tentang *asy-syura* (permusyawaratan), *al-adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), dan *al-hurriyah* (kebebasan)¹¹.

Mengingat tidak adanya konsep baku tentang bentuk negara dan pemerintahan, maka teknis penyelenggaraan diserahkan kepada umat dengan tetap mengacu pada dalil-dalil universal ajaran agama dan prinsip *maqashid asy-syariah*. Dengan demikian, landasan teologis dalam penyelenggaraan negara berupa seruan moral untuk mengapresiasi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam, pemimpin negara merupakan pelanjut tugas pokok kenabian, yaitu menjaga agama dan mengatur dunia.¹²

Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasarnya, selalu dinyatakan sebagai bukan Negara Islam (*Dawlah Islamiyah*). Namun pada waktu yang sama, Indonesia juga disebut sebagai *Darul Islam* (daerah Islam). NU melalui muktamarnya yang ke-XI di Banjarmasin, pada tanggal 19 Rabiul Awal 1355 atau 9 Juni 1936, memutuskan bahwa Indonesia adalah *Darul Islam*. Pancasila merupakan dasar negara, bukan syariat. Namun, sila demi sila didalamnya

¹¹*Ibid*, h. 24.

¹²*Ibid*

tidaklah bertentangan dengan ajaran syariat, bahkan sejalan dengan syariat itu sendiri.

Sila pertama yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid dalam akidah ke Islaman yang mengacu Al-Qur'an surat Al-Ikhlash. Sebagai ideology negara, Pancasila dapat mempersatukan beragam etnis, suku, golongan, dan agama yang ada diseluruh wilayah kekuasaan negara Indonesia. Pancasila merupak hasil ijtihad para pendiri republik ini yang sebagian besar adalah tokoh-tokoh muslim. Sangat dimungkinkan bahwa anggota tim perumus teks Pancasila yang beragama Islam, tidak semata mendasarkan rumusannya pada pertimbangan akal sehat semata, tetapi juga sebagai prinsip-prinsip ajaran dan kaidah-kaidah Islam. Hal ini semakin menguatkan pandangan dan pikiran kita bahwa Pancasila itu sangat Islami.¹³

Sejak awal terbentuknya negara dimuka bumi hingga zaman modern, telah banyak dikenal beberapa sistem pemerintahan yang dianut dan diterapkan. Misalnya, *pertama* sistem monarki, baik yang absolut ataupun yang moderat; *kedua*, sitem teokrasi, yakni sistem pemerintahan yang berdasarkan kepercayaan bahwa penguasa mendapat mandate langsung dar Tuhan; *ketiga*, sistem autokrasi, yaitu pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang; *keempat*, sistem demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan sepenuhnya kepada rakyat.¹⁴

Dalam ketatanegaraan Islam, sistem *khilafah* dan sistem pemerintahan Islam adalah dua ungkapan yang memiliki *mafhum* (pemahaman) yang

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

berbeda, tetapi memiliki *mashadaq* (substansi) yang sama. Artinya, sistem *khilafah* dan sistem pemerintahan dalam Islam secara bahasa memiliki penegrtian yang berbeda, tetapi bermuara pada maksud dan tujuan yang sama. Disebut pemerintahan Islam karena bertujuan untuk berorientasi pada terwujudnya syariat Islam serta dibangun atas prinsip-prinsip Islam.¹⁵

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam*, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitulmal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*. Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar, diceritakan bahwa dalam 6 bulan setelah diangkat jadi *khalifah*, Abu Bakar masih pergi kepasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya.¹⁶ Hak-hak *imam* ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti tersurat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 berbunyi:

تَنْزَعْتُمْ فِإِنْ مِنْكُمْ أَلَّا مَرَوْا أُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
ذَلِكَ أَلَّا خَرُوا الْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَمُّونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ إِلَهُ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ (النِّسَاء: ٥٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada

¹⁵Ibid. h. 26

¹⁶H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003),h. 60

*Allah (Al-Qur'an) dan Rasul sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisaa: 59)*¹⁷

Akan tetapi yang masih hangat diperbincangkan mengenai suatu Ormas berbasis Islam yaitu Hizbut Tahrir Indonesia yang dibubarkan pemerintah Indonesia pada tahun 2017 yang lalu. Sifat berkelompok, baik dalam ikatan lepas dalam arti hidup bermasyarakat, maupun berkelompok melakukan ikatan atau menghimpun diri dalam sebuah perkumpulan atau organisasi formal dalam arti terstruktur dan tertata, merupakan naluri ilmiah dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial, dan naluri dari manusia untuk selalu hidup dengan orang lain.¹⁸ Sifat dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan naluri yang telah ada sejak lahir.

Hubungan individu antara manusia dengan individu antara manusia dengan manusia secara naluriah menimbulkan reaksi antar individu yang berhubungan tersebut, dan karena reaksi itulah mendorong kecenderungan manusia untuk memberikan keserasian dalam melaksanakan hubungannya.¹⁹

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam organisasi masyarakat. Dalam kehidupan sekarang ini Islam menjadi perbincangan hangat di Indonesia..

Di Indonesia juga terdapat organisasi berbasis Islam, diantaranya yang pertama NU (Nahdatul Ulama) ormas ini merupakan ormas yang paling banyak di ikuti oleh masyarakat di Indonesia, yang kedua adalah Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Islamiah, FPI, HTI, dan lain sebagainya.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Hikmah :Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 78.

¹⁸Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran Ormas* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 1.

¹⁹*Ibid*

Ormas secara konkret merupakan organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi atau pusat sampai tingkat terendah atau pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.²⁰ Secara hakiki organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya kesatuan, persatuan, dalam rangka mempertahankan keutuhan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Logeman mengemukakan, tidak ada suatu kelompok yang keutuhannya dipertahankan oleh kekuatan masyarakat tertentu dan memperteguh serta memperkokoh pertalian batinnya karena organisasi.²¹

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan cabang Hizbut Tahrir, organisasi yang bertujuan politik Islam ideologis yang aktif dalam memperjuangkan agar umat Islam kembali kepada kehidupan umat Islam melalui tegaknya Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 di Al-Quds, Jerusalem, oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1979). Hizbut Tahrir bertujuan untuk membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam Darul Islam, yakni negara dan masyarakat Islam.²²

Sampai masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia pada tahun 1983 yang dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi yang merupakan anggota Hizbut Tahrir dari Yordania. Sejak diselenggarakannya konferensi internasional tersebut di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun Nasional, serta dihadiri oleh tokoh-tokoh organisasi

²⁰*Ibid*

²¹Nia Karnia Winyanti*Op.Cit*,h.12.

²² Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*,(Jakarta: Hizbut Tahrir, 2009), h.14.

lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meskipun Hizbut Tahrir Indonesia dirancang sebagai organisasi masyarakat yang dalam praktiknya memiliki tujuan politik terselubung, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang ikut dalam pemilu.²³

Akan tetapi masih hangat mengenai pembubaran ormas masyarakat berbasis Islam Hizbut Tahrir Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 lalu, berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU.0028.60.10.2014 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) nomor 2 tahun 2017 yang mengubah UU nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Freddy Harris menjelaskan bahwa Kemenkumham memiliki kewenangan legal administrative dalam pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas). Artinya administrasi tata negara perkumpulan atau ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku maka akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum.

Adapun sebaliknya, perkumpulan atau ormas bila tidak memenuhi syarat administrasi maka pihak Kemenkumham tidak akan memberi SK badan

²³*Ibid*

hukum perkumpulan atau ormas tersebut. Pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia ini dilandaskan atas ideologi yang mereka bawa. Pendirian negara khilafah dinilai tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang dianggap mengancam eksistensi demokrasi yang telah dinikmati bangsa Indonesia sejak runtuhnya orde baru.

Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan atau ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga meyakinkan pencabutan SK Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 terdapat satu pasal, yaitu pasal 80A yang menyatakan bahwa “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”²⁴

Menurut khazanah fiqh hal yang ingin dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia termasuk kedalam kategori *bughot* yang berarti pemberontakan yang berasal dari kata *bagha*, yang berarti melampaui batas. Bughot dilarang menurut fiqh dan para pelakunya harus diperangi. Hal ini berbeda dengan kritik, kritik adalah bentuk perlawanan dan tidak semua kritik kepada penguasa merupakan bughat. Kritik terhadap penguasa adalah bagian dari

²⁴Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 80A

amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan yang disebut bughat menurut Khatib Syarbini dalam kitab al-aqna' fi Halli Alfazh Abi Syuja harus memenuhi tiga sayarat: pertama, mereka yang memberontak memiliki kekuatan.

Kekuatan ini menyatukan senjata, logistik, massa,, wacana, dan sejenisnya. Kedua, mereka keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang sah, punya kekuatan saja, jika tidak keluar dari ketaatan terhadap penguasa atau imam yang sah, tidak dikategorikan bughat. Ketiga, mereka menggunakan penafsiran atau ta'wal yang batil. Maksudnya, dalam memerangi imam dan penguasa mereka menggunakan penafsiran tertentu untuk membenarkannya. Prinsip ketaatan terhadap penguasa yang sah merupakan salah satu hal penting dalam kepemimpinan.

Ketaatan disini bisa bermakna tidak keluar untuk mengangkat senjata, meskipun tidak sesuai dengan aspirasinya. Prinsip ketaatan ini untuk menjaga kelangsungan sistem sosial agar tidak terjadi anarki. Jika ingin melakukan perbaikan dalam bahasa Imam al-Ghazali disebutkan, untuk membangun sebuah bangunan tidak perlu merobohkan sebuah kota.²⁵ Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, disini penulis akan menyimpulkan bahwa ormas Islam dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia terutama bertujuan untuk mengembalikan umat Islam agar kembali kepada kehidupan umat Islam yang sebenarnya, yaitu melalui tegaknya Khilafah Islamiyah.²⁶

Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia,tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang sudah final tidak dapat

²⁵ NU Online, Hamzah, Bughat” (On-Line), tersedia di <http://www.nu.or.id/post/read40053/bughat> (1 Juni 2019).

²⁶ *Ibid*

diganggu gugat. Pancasila merupakan konsep prismatic (meminjam istilah Fred W. Riggs) yakni konsep yang mengambil segi-segi baik dari dua konsep yang bertentangan kemudian disatukan menjadi konsep tersendiri sehingga selalu dapat diaktualkan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dan setiap perkembangannya. Negara hukum yang berideologikan Pancasila bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada suatu agama tertentu, tetapi negara hukum Pancasila juga bukan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Negara Pancasila adalah negara sebuah *religious nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religious yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besar jumlah pemeluk masing-masing.²⁷

Oleh karena itu, status dari pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia ini masih menjadi polemik dikalangan masyarakat dan para tokoh, untuk itu penulis tertarik ingin meneliti masalah ini mengenai bagaimana proses dan alasan pemerintah Indonesia membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia serta pandangan Hukum Islam dan konstitusi terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ini. Itulah beberapa poin penting yang akan penulis bahas pada penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

²⁷Zuhraini, "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila", (Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 1 Oleh UIN Raden Intan Lampung, Juni 2016), h. 175 (On-line), tersediadi <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, (19 April 2019, 18:42), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, kiranya dapat dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan proses pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Indonesia serta pandangan para tokoh?
2. Bagaimana pandangan konstitusi dan peraturan di Indonesia terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan proses pembubaran HTI di Indonesia serta pandangan para tokoh.
 - b. Untuk mengetahui pandangan konstitusi dan peraturan di Indonesia terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis
 - 1) Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia oleh pemerintah.
 - 2) Untuk mengetahui tentang pandangan Hukum Islam dan konstitusi terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.
 - b. Manfaat secara praktis
 - 1) Memberikan wawasan kepada penulis serta semua kalangan masyarakat umum dalam menanggapi permasalahan hukum maupun isu ormas yang bertentangan dengan Pancasila yang

berkembang pada saat ini terutama terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

- 2) Sumbangsih karya ilmiah sebagai bentuk kecintaan penulis terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian pustaka yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.²⁸ Adapun penelitian ini dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memeparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.²⁹

2. Sumber data

²⁸Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h. 9.

²⁹Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h. 126.

Data dalam penelitian ini termasuk data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bersumber dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 17 tahun 2013, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017, Al-Qur'an dan Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa ensiklopedia hukum Islam, kamus, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data bahan hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta referensi buku terkait yang kemudian dijadikan bahan hukum primer, sedangkan dalam hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori dan pendapat yang berkaitan erat dengan

permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

4. Metode Pengolah Data

Setelah sumber (*literatur*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut:

Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.

- a. Penandaan Data yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.
- b. Rekonstruksi Data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematika Data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.³⁰

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode komparasi yaitu dengan membandingkan persamaan pandangan dan perubahan pandangan orang ,

³⁰ Susiadi, *Op. Cit.*, h.129.

grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.³¹

BAB II

ORMAS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ormas dan Dasar Hukumnya

Ormas secara konkret merupakan organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi atau pusat sampai tingkat terendah atau pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga. Sebelum membahas lebih jauh tentang ormas, maka alangkah baiknya kita ketahui dulu tentang pengertian organisasi dan ormas itu sendiri, sehingga diharapkan setelah mengetahui pengertiannya, akan dengan mudah membawa dan memberikan pemahaman kepada kita secara utuh tentang ruang lingkup dan kiprah ormas secara keseluruhan.

Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “organon” dan istilah Latin, yaitu “organum” yang berarti: alat, bagian, anggota atau badan. Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan dasar ideology (cita-cita) yang sama. Selanjutnya, James D Mooney mengatakan bahwa “organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, ada tiga ciri suatu organisasi, yaitu :

³¹ Susiadi, *Op.Cit*, h.135.

1. Adanya sekelompok orang;
2. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerja sama yang harmonis, dan;
3. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Secara hakiki organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanyakesatuan, persatuan, dalam rangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Logeman mengemukakan, tidak ada suatu kelompok yang keutuhannya dipertahankan oleh kekuatan masyarakat tertentu dan yang memperteguh serta memperkokoh pertalian batinnya karena organisasi. Yang ada ialah suatu organisasi yang mempertahankan keutuhan daripada suatu kelompok tertentu karena kegiatan organisasi itu.³² Sejalan dengan itu Sondang P. Siagian, menerangkan apa itu organisasi dengan melihatnya dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu:³³

1. Organisasi dipandang sebagai wadah;
2. Organisasi dapat dipandang sebagai proses;
3. Organisasi sebagai kumpulan orang.

Berangkat dari uraian tersebut, bahwa suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tersebut;

³²M. Manulang, *Dasar-Dasar.....*, *Op.cit.*, h. 68.

³³Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1980), h. 68.

2. Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai organisasi yang bersangkutan;
3. Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi;
4. Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (*job description*);
5. Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
6. Mempunyai system kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kemasyarakatan berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.³⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat.³⁵ Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan “masyarakat” berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang

³⁴Babdudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 967.

³⁵*Ibid*

mereka anggap sama; sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat.³⁶

Berangkat dari uraian di atas, maka pengertian “organisasi kemasyarakatan” dapat dengan menggabungkan pengertian “organisasi” dengan pengertian “kemasyarakatan”, sebagaimana uraian di atas, sehingga menurut hemat penulis akan mempunyai arti sebagai berikut:

Organisasi kemasyarakatan adalah wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluasluasnya.³⁷

Dalam PerPPU Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 adalah bahwa “organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara

³⁶ W.M Susiloeati, “Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1995”, (Tesis Program Pasca Sarjana Unpad, Bandung, 1997), h. 90.

³⁷ Nia Karnia Winyanti. *Op. Cit.*, h. 15

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar”³⁸.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan suatu ormas yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang.

B. Syarat Berdirinya Ormas

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh pasal 28 UUD 1945, merupakan hal pokok perlindungan yuridis yang diberikan negara kepada setiap warga negara. Berserikat dan berkumpul dalam konteks bahasan ini, bukan hanya sekadar berkumpul (kongko-kongko yang sifatnya sementara dalam bentuk diskusi, lalu kemudian bubar) tetapi berserikat dan berkumpul yang bersifat permanen, selama itu terus dikehendaki dan tetap bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk dan diikuti anggotanya. Organisasi dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan.

Undang-Undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menyebutkan syarat-syarat pendirian suatu Ormas, yaitu:

Pasal 9

Menjelaskan bahwa organisasi masyarakat di dirikan oleh 3 (tiga) orang warga Indonesia atau lebih, kecuali organisasi masyarakat yang berbadan hukum yayasan.³⁹

³⁸Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 1

Pasal 10

Organisasi masyarakat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.⁴⁰

Pasal 11

Organisasi masyarakat yang memiliki badan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Organisasi masyarakat berbadan hukum di dirikan dengan berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.⁴¹

Pasal 12

Badan hukum yang dimiliki oleh suatu organisasi masyarakat harus memiliki dan memenuhi persyaratan diantaranya:⁴²

- 1). Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART.
- 2). Program kerja.
- 3). Sumber pendanaan.
- 4). Surat keterangan domisili.
- 5). Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan
- 6). Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Pengesahan dari status badan hukum suatu perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan meminta pertimbangan dari instansi terkait.

³⁹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 9

⁴⁰Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 10

⁴¹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 11

⁴²Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 12

Pasal 15

Ormas yang sudah memiliki badan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum melalui instansi terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴³

Pasal 16

Pendaftaran organisasi masyarakat yang tidak memiliki status badan hukum harus memenuhi persyaratan agar mendapatkan surat keterangan terdaftar, yaitu:⁴⁴

- 1). Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART.
- 2). Program kerja.
- 3). Susunan pengurus.
- 4). Surat keterangan domisili.
- 5). Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi masyarakat.
- 6). Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
- 7). Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Surat keterangan terdaftar dari suatu organisasi masyarakat diberikan oleh pejabat berwenang, contohnya jika organisasi tersebut memiliki lingkup nasional maka diberikan oleh Menteri yang berwenang.

C. Prinsip-Prinsip dan Kaidah Pokok Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Aturan Organisasi

⁴³Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 15

⁴⁴Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 16

1. Prinsip-Prinsip dan Kaidah Pokok Hukum Islam Tentang Aturan Organisasi

Dalam hukum Islam tidak ada aturan yang spesifik yang mengatur tentang aturan pokok dari suatu organisasi atau organisasi masyarakat. Mendirikan suatu organisasi adalah perkara muamalah, dan muamalah itu hukum asalnya mubah, dan tentu saja membuat organisasi untuk dakwah dan menolong Islam adalah bentuk saling tolong menolong dalam kebaikan.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah : 2 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S.Al-Maidah : 2)⁴⁵

⁴⁵ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz" (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h. 223

Para ulama mengatakan bahwa membuat organisasi atau yayasan atau perkumpulan dalam rangka kebaikan adalah hal yang dibolehkan, selama tidak dijadikan sarana *tahazzub* (fanatik kelompok), dan tidak dijadikan patokan *al wala wal bara* sehingga sesama anggota organisasi dianggap teman dan diluar organisasi dianggap lawan. Syaikh Abul Hasan Ali Ma'rifi mengatakan “Disyariatkan organisasi, yayasan, atau perkumpulan sosial adalah perkara yang tidak diingkari oleh siapapun. Selama aktivitas-aktivitas organisasi tersebut dalam rangka menolong, membelanya dan mendukung al haq.”⁴⁶

Dengan syarat anggotanya bebas dari sifat *tahazzub* (fanatik kelompok) yang tercela, dan dari fitnah harta, dan hal-hal lain yang memperburuk dakwah di setiap tempat. Adapun jika aktivitas organisasi ini hanya untuk pencitraan, padahal dibalik itu ada perkataan-perkataan menyimpang seperti mencela para ulama bahwa mereka murji'ah atau jahmiyah atau mengatakan bahwa mereka itu bodoh terhadap realita umat, atau organisasi tersebut menggiring fitnah terhadap penguasa, lalu mulailah fitnah takfir dan berakhir dengan pembunuhan, penghalalan darah dan pengeboman, atau organisasi yang memerintahkan anggotanya untuk berbuat sehingga memecah kaum muslimin, maka organisasi yang demikian ini semua bukanlah aktivitas dari sebuah organisasi yang baik.

Prinsip dasar organisasi selaras dengan lima kaidah pokok fiqh yang termaktub dalam *Asas Al-Attasyri*.

Lima kaidah pokok yang termasuk di dalam asas tersebut diatas:⁴⁷

- a. Anjuran kebaikan (الأمر بالمعروف)
- b. Mencegah kemungkaran (النهي عن المنكر)
- c. Menolak bencana (دفع الضرر)
- d. Mempersedikit beban (تقليل التكاليف)

⁴⁶ Muslim.or.id. (On-line), tersedia di <http://muslim.or.id/21379-hukum-organisasi-dan-taat-pada-pimpinan-organisasi.html>, (19 April 2019)

⁴⁷ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2016), h. 138.

e. Bertahap dalam penetapan (التدرج في التشريع)

Lima kaidah pokok tersebut merefleksikan nilai-nilai dalam organisasi, baik dalam kegiatannya yang berupa sosial, dan internal organisasi. Dalam menentukan asas dan tujuan perlu adanya sebuah asas untuk menjadi landasan dan daya tolak ukur organisasi tersebut.

Salah satu contoh tujuan dari organisasi Islam terbesar yang penulis kutip menurut tujuan dari organisasi Islam NU yang mana tujuan dari organisasi ini adalah menegakkan ajaran menurut paham Ahlussunnah waljama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁸

Tujuan diantaranya dalam bidang usaha:

- a. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
- b. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa.
- c. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.

⁴⁸Nahdlatul Ulama". (On-line), tersedia di http://m.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama, (15 April 2019).

- d. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat.
- e. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU berusaha mengabdikan dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Hukum Positif Tentang Aturan Organisasi

Undang-undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan mensyaratkan mengenai prinsip atau aturan mengenai suatu organisasi masyarakat yaitu:



Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴⁹

Pasal 3

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

Pasal 4

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.⁵¹

⁴⁹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 2

⁵⁰Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 3

Pasal 5

Pada pasal 5 ini disebutkan bahwasanya organisasi masyarakat memiliki beberapa tujuan:⁵²

- 1). Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
- 2). Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3). Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4). Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
- 5). Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 6). Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- 7). Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 8). Mewujudkan tujuan negara.

Pasal 6

Pada pasal ini dijelaskan bahwasanya pendirian suatu organisasi masyarakat yang memiliki fungsi sebagai berikut:⁵³

- 1). Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan organisasi.
- 2). Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- 3). Penyalur aspirasi masyarakat.
- 4). Pemberdayaan masyarakat.

⁵¹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 4

⁵²Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 5

⁵³Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 6

- 5). Pemenuhan pelayanan sosial.
- 6). Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7). Pemeliharaan dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa pasal diatas merupakan sebagian aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai prinsip-prinsip dari suatu organisasi masyarakat yang tertuang di dalam undang-undang mengenai organisasi masyarakat.

D. Larangan-Larangan terhadap Ormas Dalam Pandangan Hukum Islam dan Konstitusi

1. Larangan-larangan terhadap ormas dalam pandangan hukum Islam
- Berbicara mengenai pandangan hukum Islam tentang larangan-larangan dalam suatu organisasi masyarakat penulis mengacu kepadahadist dan kaidah-kaidah pokok fiqh karena dalam Al-Qur'an tidak diatur secara jelas bagaimana pandangan hukum Islam mengenai suatu organisasi masyarakat (Ormas), tetapi penulis disini mengambil dan merujuk kepada hadist dan kaidah pokok dalam fiqh. Dalam buku Dr. Bunyana Solihin, M.Ag tentang kaidah-kaidah hukum Islam dalam tertib dan fungsi legislasi hukum dan perundang undangan. Sabda Rasulullah SAW yang sangat populer dan mencakup segala permasalahan, yaitu hadist yang diriwayatkan dari Umar bin Khathab bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

وَلْ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا تَوَيْعَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصَيِّبُهَا
أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يُنْكِحُهَا فَهَاجِرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵⁴

Artinya: Setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niat, dan untuk setiap perbuatan setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Maka siapapun yang melakukan hijrah untuk menuju Allah dan Rasul-Nya, niscaya hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya. Barng siapa melakukan hijrah untuk tujuan dunia atau menikahi wanita maka hijrahnya itu adalah sebagaimana dimaksudkan. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁵⁵

Dalam istilah perundang-undangan (mewujudkan dan memelihara kemaslahatan) sebagai tujuan syar'iyah pada hakekatnya adalah visi umum syari'at Islam. Untuk merealisasikan dan mewujudkan suatu visi tentunya memerlukan misi sebagai strategi pencapaian misi. Strategi dan misi hukum Islam inilah yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rumusan kaidah fiqh.⁵⁶

Selanjutnya oleh Tajuddin al-Sabki (727-771) dari kalangan ulama Syafi'i pada abad ke- 8 H, kaidah tambahan yang kelima tersebut karena cakupannya yang paling luas dan meliputi seluruh bidang dan cabang hukum, yaitu bidang-bidang ibadah, mu'amalah, jinayah, ahwal asy-syakhiyyah, munakahat, mawaris, bahkan termasuk bidang politik kenegaraan dan tata perilaku kehidupan antar sesama, maka kaidah(*segala urusan tergantung maksudnya*) menurutnya akan lebih pantas apabila diletakkan pada urutan kaidah yang pertama mendahului empat kaidah

⁵⁴Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Juz. 1, No. 1* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2000), h. 6.

⁵⁵Bunyana Solihin, "*kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*" (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 136.

⁵⁶*Ibid*

lainnya. Akhirnya tertib urutan kaidah pokok fiqhiyyah selanjutnya berlaku secara baku menjadi:⁵⁷

- a. Segala urusan tergantung maksudnya
- b. Yang diyakini tidak hapus karena hal yang meragukan
- c. Kesulitan itu membawa kemudahan
- d. Yang berbahaya itu dihilangkan
- e. Adat kebiasaan itu menjadi hukum

Lima kaidah dimaksud selanjutnya disebut sebagai kaidah pokok fiqhiyyah, karena masing-masing dari lima kaidah itu mencakup sejumlah kaidah cabang dan berlaku untuk hampir seluruh kasus pada setiap bidang kajian ilmu fiqh. Dari sedikit uraian diatas penulisan dapat menyimpulkan bahwasanya dalam hal ini larangan dari sebuah perkumpulan atau organisasi masyarakat dalam pandangan hukum Islam mengacu pada kaidah pokok fiqhiyyah yang pertama segala urusan tergantung maksudnya, yang artinya tidak ada larangan-larangan bagi organisasi masyarakat yang tujuannya baik dan demi kemaslahatan orang banyak.

2. Larangan-larangan terhadap ormas dalam pandangan konstitusi

Berbicara soal konstitusi berarti kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mana Undang-Undang Dasar 1945 adalah aturan dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menetapkan suatu hukum yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Disini penulis akan menjelaskan sedikit mengenai arti dari konstitusi.

⁵⁷*Ibid.h.139*

Konstitusi dalam arti luas, adalah keseluruhan peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara, mulai dari yang tertinggi sampai pada yang terendah.

Di Indonesia disebut “peraturan perundang-undangan” yaitu semua ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa “jenis dan hierarkis peraturan perundang-undangan terdiri atas:⁵⁸

- 
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Ketetapan Majelis Peemusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
 - c. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(PerPPU)
 - d. Peraturan Pemerintah (PP)
 - e. Peraturan Presiden (Perpres)
 - f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota).

Sedangkan pengertian konstitusi dalam arti sempit adalah Piagam Dasar atau Dokumen mengenai Hukum Dasar suatu negara. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 yang sudah lebih dari 20 kali amandemen, dan Konstitusi Perancis tahun 1848. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Konstitusi dalam arti sempit,

⁵⁸ Marwan Mas, “*Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*” (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 12.

adalah hukum dasar suatu negara, dan di Indonesia disebut Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁹

Umumnya setiap negara memiliki Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Tetapi negara yang tidak memiliki satu naskah konstitusi seperti Inggris, tetap memiliki aturan-aturan yang tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktik ketatanegaraan dan para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris⁶⁰. Kemudian mengenai larangan dari suatu organisasi masyarakat menurut konstitusi berarti mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.



Pasal 59

Pada pasal ini dijelaskan bahwasanya suatu organisasi masyarakat dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan. Menggunakan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga Internasional ,menjadi nama, lambang, atau bendera organisasi masyarakat. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰*Ibid.h.13*

organisasi masyarakat lain atau partai politik.⁶¹ Ormas dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta mengumpulkan dana untuk partai politik.⁶² Selanjutnya organisasi masyarakat dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dan fasilitas sosial, serta melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³ Selanjutnya larangan terhadap organisasi masyarakat yaitu menggunakan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.⁶⁴

⁶¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 59 ayat (1)

⁶²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 59 ayat (2)

⁶³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 59 ayat (3)

⁶⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 59 ayat (4)

Berdasarkan uraian beberapa pasal diatas sudah jelas mengenai larangan-larangan terhadap organisasi masyarakat yang berdasarkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.



BAB III

PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

A. Sejarah Hizbut Tahrir di Dunia dan Indonesia

1. Sejarah Hizbut Tahrir di Dunia

Hizbut Tahrir disebut juga Partai pembebasan. Ia adalah partai politik bertaraf Internasional yang bertujuan untuk menegakkan kembali kekhalifahan Islam atau Negara Islam Dunia di bawah satu bendera. Dengan kata lain, konsep *nation-state*. Muhammad Taqiyyudin al-Nabhani (1909-1977) adalah penggagas pertama pendirian Hizbut Tahrir. Taqiyyudin lahir di sebuah desa dekat Haifa Palestina. Dibesarkan oleh satu keluarga yang taat. Taqiyyudin berasal dari golongan kelas menengah. Kakenya dari pihak ibu yang bernama Yusuf al-Nabhani (1849-1932)

adalah seorang penyair ternama dan pernah menjabat sebagai hakim Islam di bawah kekhalifahan Utsmaniyah.⁶⁵

Taqiyyudin kecil mendapat pelajaran agama dari orang-orang terdekatnya. Bidang yang digeluti oleh Taqiyyudin al-Nabhani sejak kecil adalah Ilmu Fiqh atau Yurisprudensi Islam. Pada usia 12 tahun, Taqiyyudin mampu menghafal seluh Al-Qur'an. Umumnya, anak keturunan bangsawan dan agamawan memang menghafal Al-Qur'an. Kelak nama Taqiyyuddin al-Nabhani akan dikenal di seantero jagad. Pada tanggal 3 Maret 1924, Khilafah Otonom secara resmi dihapuskan. Majelis Nasional Negara Turki yang baru didirikan Mustafa Kemal Atatürk menyepakati bahwa Turki modern akan lepas dari sejarah masa lalu mereka. Sistem Khilafah sudah tidak cocok diterapkan di abad 20. Tentu saja, keputusan politik negara Turki ini membuat hati Taqiyyuddin gelisah, terlebih keluarga besarnya. Taqiyyuddin al-Nabhani tumbuh dewasa dan matang dalam ketidakpuasan atas keputusan politis Turki modern menghapus sistem Khilafah Islamiyah. Pembentukan kembali Khilafah sebagai sebuah negara *super power* yang dimiliki umat Islam di seluruh dunia menjadi satu-satunya agenda besar Taqiyyuddin al-Nabhani. Kelak, Hizbut Tahrir didirikan untuk mewujudkan visi misi keluarga Taqiyyuddin al-Nabhani ini.⁶⁶

Namun begitu, jauh sebelum Hizbut Tahrir didirikan pembubaran sistem kekhalifahan oleh Turki Utsmaniyah telah mengilhami tokoh besar

⁶⁵ Mohammad Nuruzzaman, "Catatan Hitam Hizbut Tahrir" (Yogyakarta: Belibis Pustaka, 2017), h.32.

⁶⁶*Ibid.* h.33.

lain, Hassan al-Banna. Beliau pun membentuk Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1928. Kedekatan Hassan al-Banna dan Taqiyuddin al-Nabhani menjadi sangat beralasan karena adanya kesamaan visi. Selain Hassan al-Banna, Taqiyuddin al-Nabhani juga mempunyai kedekatan dengan senior Ikhwanul Muslimin lainnya, Amin al-Husseini (1894-1974). Dari tahun 1918 sampai Mei 1948, Husseini mendapat mandat dari Inggris dan dipilih untuk mewakili orang-orang Palestina, Di tahun 1921, Inggris menunjuk Husseini sebagai Mufti Yerusalem. Sayangnya, Husseini melakukan serangan mematisasi terhadap orang-orang Yahudi di wilayah Yerusalem, berdemonstrasi menentang Inggris, sehingga menyebabkan Husseini harus dipecat dari jabatannya pada tahun 1936.⁶⁷

Husseini melarikan diri dari wilayah *mandate* pada tahun 1937, dan kemudian menjadi tamu kehormatan Adolp Hitler pada tahun 1941. Husseini berkolaborasi dengan Partai Nazi dalam pembantaian umat Yahudi. Meskipun dicegah masuk kembali ke Yerusalem, Husseini tetap diangkat sebagai pemimpin lokal Ikhwanul Muslimin di tahun 1940-an. Bagaimanapun, Taqiyuddin al-Nabhani banyak mendapat inspirasi dari Husseini tersebut.⁶⁸

Masih di lingkaran Ikhwanul Muslimin, tokoh lain yang berpengaruh atas pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani muda adalah seorang imigran dari Syria bernama Izzuddin al-Qassam (1882-1935). Al-Qassam adalah pejuang yang pernah melawan Perancis pada tahun 1921, dan

⁶⁷*Ibid.h.34*

⁶⁸*Ibid*

dipaksa melarikan diri dari negara asalnya, Suriah, ke Haifa. Di Haifa inilah, al Nabhani berjumpa pertama kalinya dengan al-Qassam.⁶⁹

Ditambah lagi, al-Qassam sendiri terlibat intensif dalam melakukan demonstrasi dan serangan terhadap orang-orang Yahudi bersama al-Husseini. Pada tahun 1930, al-Qassam mengorganisir sel-sel para jihadis untuk menyerang orang-orang Yahudi, Inggris dan kepentingan mereka. Taqiyuddin al-Nabhani sangat terinspirasi oleh gerakan al-Qassam dan al-Husseini ini. Sayangnya, pada tanggal 19 November 1935, al-Qassam yang diburu oleh Inggris berhasil ditembak mati. Kematian Qassam sebagai tokoh terkemuka dalam gerakan Ikhwanul Muslimin menginspirasi sahabat-sahabatnya yang lain. Nama al-Qassam pun digunakan untuk kelompok sayap Hamas yang juga didirikan oleh Ikhwanul Muslimin. Nama kelompok sayap militer tersebut *Brigade Izzidine al-Qassam*. Selain itu, untuk menghormati nama al-Qassam, sebuah roket disebut roket al-Qassam selama masa belasan tahun.⁷⁰

Sebelum menjadi aktivis politik, karir Taqiyuddin al-Nabhani dimulai dengan menjadi praktisi yurisprudensi Islam. Dia belajar di Universitas al-Azhar dan Dar al-Ulum, keduanya sama-sama berbasis di kota Kairo, Mesir. Saat belajar di Mesir, al-Nabhani telah bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Antara tahun 1932 dan 1938, al-Nabhani pernah menjadi guru di Palestina. Namun, dirinya menolak praktik akademik ala Barat. Al-Nabhani mencoba melamar ke Pengadilan Tinggi

⁶⁹*Ibid*

⁷⁰*Ibid.h.35*

Palestina untuk menjadi hakim. Lamarannya itu diterima dan ia mendapat pekerjaan di Bisan, Tiberias dan Haifa. Al-Nabhani pun mengkaji hukum Islam dengan serius sampai tahun 1945.⁷¹

Puncak perenungannya itulah, al-Nabhani merasa harus mendirikan Partai Pembebasan atau *hizbut Tahrir*. Sebagaimana terinspirasi oleh al-Qassam dan al-Husseini, al-Nabhani pun mulai melibatkan diri dalam plot politik yang digagas oleh Kolonel Abdullah al-Tall. Kita tahu, Abdullah al-Tall tokoh terkenal anti-Semit. Al-Tall meratapi kematian rekan terdekatnya, al-Husseini, dan menyebutnya sebagai “Martir” yang gugur dalam sebuah “Perang Suci”.⁷²

Kolonel al-Tall adalah militer yang menjabat sebagai Gubernur Yordania di Yerusalem. Selain itu, al-Tall juga berperan sebagai negosiator bagi Raja Abdullah Yordania ketika orang-orang Yahudi membentuk negara Israel dan konflik Arab-Israel pecah. Sebagaimana al-Talla, al-Nabhani juga bermain disini, dalam lobi-lobi politik dengan orang-orang yahudi. Awalnya, Palestina dan Transyordan telah diatur dibawah mandat Inggris. Namun, restu PBB akan pendirian Israel dieksploitasi oleh raja Hashemite Abdullah I. Kerajaan Hashemite ini dibentuk pada tanggal 25 Mei 1946, sebelum Palestina itu sendiri bebas dari mandat Inggris.⁷³

Pada bulan Mei 1948, pasukan Raja Abdullah berhasil menduduki Yerusalem. Israel pun terpaksa menandatangani gencatan senjata dengan

⁷¹*Ibid*

⁷²*Ibid.h.36*

⁷³ *Ibid*

Yordania pada tanggal 3 April 1949. Dengan menentang protokol PBB, Raja Abdullah ingin mencaplok Central Palestine (Tepi Barat). Pemerintahan Raja Abdullah mengeluarkan sebuah resolusi untuk masalah ini pada tanggal 25 April 1950. Namun, perjuangan Raja Abdullah harus kandas ditengah jalan. Pada tanggal 20 Juli 1951, Raja Abdullah ditembak mati di dalam Masjid Al-Aqsa saat dia tiba untuk sholat jum'at⁷⁴.

Kolonel Abdullah al-Tall adalah satu dari enam orang yang terbukti bersalah dalam merencanakan pembunuhan raja Abdullah tersebut. Namun, dia melarikan diri ke Mesir dan dijatuhi hukuman mati secara *in absentia*. Sebagaimana yang secara resmi diakui oleh Hizbut Tahrir, keterlibatan an-Nabhani dalam kudeta Raja Abdullah betul-betul terjadi.⁷⁵

Dengan begitu, Taqiyuddin al-Nabhani sudah mulai belajar bagaimana terlibat dalam plot politik, bermain lobi-lobi kekuasaan, serta melakukan kekerasan dan pembunuhan atas orang-orang yang tidak disukainya. Hizbut Tahrir menjadi kuda tunggangan untuk mengantarkan ambisi pribadi dan keluarganya tersebut. Selanjutnya, sebagai seorang akademikus, al-Nabhani menerbitkan 19 buku. Karya yang pertama terbit pada bulan Januari 1950 berjudul *Saving Palestine*. Al-Nabhani tidak percaya pada pemerintahan Arab yang dibentuk pada tahun 1945, pemerintahan Arab mengabaikan pesan-pesan yang dia kirim.⁷⁶

⁷⁴*Ibid*

⁷⁵*Ibid. h. 37.*

⁷⁶*Ibid*

Dalam pesan itu, al-Nabhani mendesak pemerintahan untuk fokus menyatukan garis agama. Al-Nabhani pun dengan amat serius ingin mendirikan parat politik. Dia mendirikan Hizbut Tahrir antara bulan November 1952 dan awal 1953 di Yerusalem. Pemerintah Yordania buru-buru mengumumkan bahwa partai tersebut ilegal. Versi lain mnegatakan, pendirian Hizbut Tahrir oleh al-Nabhani terjadi dengan resminya Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*) karena memiliki hubungan erat dengan pendirian Yordania.⁷⁷

Yordania pun terbukti tidak pernah serius untuk melarang Ikhwanul Muslimin. Disaat al-Nabhani ingin menyatupadukan negara-negara Islam dibawah satu komando, Ikhwanul Muslimin sebagai organisasinya malah ikut melegetimatis keterpecahan tersebut. Pantas saja al-Nabhani kecewa hati. Kekecewaan lain al-Nabhani pada Ikhwanul Muslimin lantaran Ikhwan ini telah mengirim banyak pejuang untuk melawan Israel dan awalnya berkolusi dengan para pejabat Mesir untuk melakukan kudeta, yang berlangsung pada tanggal 23 Juli 1952. Kudeta yang dilakukan Ikhwan bersama para pejabat politik ini berhasil mengantarkan Gamal Abdel Nasser berkuasa.⁷⁸

Nasser tidak memberi imbalan kepada Ikhwanul Muslimin seperti yang dia janjikan. Karena Ikhwan tidak banyak menuntut maka al-Nabhani semakin ragu atas keseriusan Ikhwanul Muslimin memahami Islam. Al-Nabhani pun terpaksa harus membentuk Hizbut Tahrir dengan maksud

⁷⁷*Ibid*

⁷⁸*Ibid*

untuk “membebaskan” Palestina dan juga membebaskan Yordania dari dinasti Hashemite.⁷⁹

Tujuan-tujuan pembebasan inilah yang menginspirasi pemberian nama pada organisasi bentukannya, yaitu Partai Pembebasan. Al-Nabhani ingin membebaskan seluruh negara dan membentuknya kembali di bawah sistem tunggal Khilafah Islam. Tujuan akhir Hizbut Tahrir mengarah pada pemerintahan Islam global. Kekecewaan lain Taqiyuddin al-Nabhani, sehingga dia terpaksa melepaskan diri dari Ikhwan dan mendirikan Hizbut Tahrir, adalah melihat kenyataan Islam terpecah belah kedalam sektarianisme yang banyak. Walaupun Ikhwanul Muslimin baru-baru ini mendukung perjuangan Syiah Hizbullah dan Lebanon, tapi tidak dipungkiri Ikhwanul Muslimin secara tradisional merupakan institusi Sunni.⁸⁰

Taqiyuddin al-Nabhani melihat bahwa gagasan kekhalifahan tidak akan bisa berjalan selama sekte-sekte dalam Islam dijadikan nomor satu. Al-Nabhani membayangkan, seluruh kelompok dan sekte dalam Islam akan berada dalam satu naungan yurisprudensi yang pernah dicontohkan oleh kakeknya sendiri, selama masa kejayaan kekhalifahan Utsmaniyah. Pengalaman keluarga sekaligus pengalaman pribadi, yaitu ketika Taqiyuddin al-Nabhani mempraktikkan hukum Islam di Tepi Barat di bawah pemerintahan Utsmaniyah, membuatnya semakin percaya diri. Dalam artian, sistem Khilafah masih sangat mungkin.

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰*Ibid. h.39*

Mimpi keluarganya masih mungkin diwujudkan. Hizbut Tahrir harus menjadi kuda tunggangan demi mewujudkan mimpi ambisius keluarga tersebut. Dalam bukunya yang lain, *The Islamic State* yang ditulis pada tahun 1953, Taqiyuddin al-Nabhani membahas betapa pentingnya mengabaikan batasan-batasan nasional. Batasan-batasan inilah yang menjadi penghambat sekaligus memisahkan negara-negara Muslim. Sama seperti Ikhwanul Muslimin, dengan sila-sila yang tercantum dalam dokumen mereka, al-Nabhani juga berpendapat bahwa umat Islam yang tinggal di negara-negara non-Muslim wajib mengikis negara-negara tersebut dari dalam.⁸¹

Al-Nabhani menulis:

“Umat Islam di tanah non-Muslim harus bekerja untuk mengubah tanah mereka dan memperjuangkan agar hukum Islam segera ditegakkan, yang tidak demikian dianggap sebagai Dar al-Kufr. Oleh karena itu, tugas setiap Muslim sejak saat ini adalah dalam rangka membangun sebuah negara Islam yang lebih besar, yang akan menyampaikan pesan Islam kepada dunia. Pekerjaan seorang Muslim harus dimulai dengan membawa dakwah Islam, dengan tujuan menerapkan ajaran Islam di semua negara Muslim, dengan cara menunjuk satu orang yang dipusatkan di suatu negara, sehingga tujuan menyebarkan paham tersebut dengan mudah akan tercapai”

Pada tahun 1950, Hizbut Tahrir menyebar melalui Levant ke Arab Saudi, selama tahun 1960-an, Hizbut Tahrir menyebar ke negara-negara Afrika Utara dan Turki, kemudian diikuti oleh negara-negara Muslim lainnya. Taqiyuddin al-Nabhani adalah Amir pertama Hizbut Tahrir. Pada tahun 1955, al-Nabhani meninggalkan Yordania menuju Damaskus dan Beirut. Dia melakukan perjalanan ke Irak pada tahun 1973. Di Irak, al-Nabhani

⁸¹ *Ibid. h.40*

dipenjara dan disiksa. Hizbut Tahrir mengklaim bahwa al-Nabhani adalah sebagai “juru tulis” organisasi, bukan pemimpinnya. Alhasil, al-Nabhani harus menghembuskan nafas terakhirnya di Beirut pada tanggal 27 Desember 1977. Hizbut Tahrir telah meningkatkan pengaruhnya keseluruhan dunia. Sekitar tahun 2011 yang lalu, Hizbut Tahrir telah memiliki basis kuat di 40 negara lebih. Sekarang, Hizbut Tahrir diperkirakan telah berkembang kuat di 45 negara di seluruh dunia.⁸²

Karena Hizbut Tahrir tidak mengenal negara-negara, maka setiap negara yang menjadi basisnya disebut sebagai cabang nasional atau *vilayas* atau provinsi. Memang sejak awal, Hizbut Tahrir membenci sistem demokrasi dan pemilihan umum sebagaimana terjadi di negara-negara modern. Namun sistem *vilayas* memungkinkan anggotanya untuk memilih pemimpin dan komite eksekutif mereka. Ada satu kepemimpinan sentral dalam Hizbut Tahrir Internasional, yang disebut *Qiyada*. Kepala komite pusat ini disebut “Amir” dan masa jabatannya ada sampai kematiannya. Sudah ada tiga amir seperti itu sejak partai tersebut didirikan pada tahun 1953. Meskipun kelompok ini telah menjadi lebih terbuka tentang struktur dan keanggotannya dalam beberapa tahun terakhir, sumber pendanaanya tetap menjadi misteri.⁸³

Di Indonesia, Hizbut Tahrir yang dikenal dengan HTI diperkirakan telah memiliki 100.000 pengikut di 33 provinsi. Tema-tema kampanye yang mereka usung tidak jauh-jauh dari ambisi keluarga Taqiuddin al-

⁸²*Ibid.* h.42

⁸³*Ibid*

Nabhani, yaitu penghapusan konstitusi “sekuler” dan kembali pada model pemerintahan dimana kakek dan keluarga al-Nabhani dulu nyaman bekerja.⁸⁴

2. Sejarah Hizbut Hizbut Tahrir di Indonesia

Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia pada tahun 1983 bermula dari Ustad Mamak Abdullah bin Nuh. Pengelola pondok pesantren Al-Ghazali, Bogor yang juga staf pengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini, mengajak ustad Abdurrahmad Al-Baghdadi untuk menetap di Bogor, merupakan anggota Hizbut Tahrir dari Yordania, yang merupakan hasil perluasan wilayah oleh Hizbut Tahrir pusat di Yordania. Pada saat inilah, Al-Baghdadi berinteraksi dengan para aktivis Islam di masjid Al Ghifari, dan di IPB.⁸⁵ Pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir yang diperkenalkan Al-Baghdadi, rupanya mampu menarik perhatian aktivis masjid kampus ini.

Mulailah dibuat halaqah-halaqah kecil untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Hizbut Tahrir. Dibuatnya buku-buku tentang Hizbut Tahrir, dan lainnya pun mulai dikaji dengan serius. Melalui jaringan lembaga dakwah kampus inilah, ajaran-ajaran Hizbut Tahrir menyebar kekampus-kampus diluar Bogor seperti Unpad, IKIP Malang, Unair, Unhas dan akhirnya menyebar keseluruh Indonesia.⁸⁶

Pada tahun 2000 Hizbut Tahrir muncul dimuka publik Indonesia dengan menyelenggarakan konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di

⁸⁴ *Ibid.* h.43

⁸⁵ Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia", *episteme*, vol 12 No. 1 (Juni 2017), diunduh pada tanggal 15 Agustus, h.173.

⁸⁶ Meila Iskatrika, "Pembubaran Ormas HTI Dalam Perspektif Siyash", (Skripsi UIN RIL) h.43.

Senayan Jakarta yang dihadiri 5000 orang. Tahun berikutnya Hizbut Tahrir menggugah solidaritas kepada dunia Islam dengan mendemo Kedubes AS atas serangan ke Afganistan. Juga mengirim delegasi ke berbagai Kedubes Negara Arab dan Islam menuntut dukungan mereka atas Palestina yang dijajah Israel, serta menuntut mereka menolak bekerjasama dengan AS dalam pendudukan Irak. Terhadap permasalahan dalam negeri Hizbut Tahrir pernah memimpin sekitar 12 ribu masa *longmarch* dari Monas ke Senayan menuntut penerapan syari'ah Islamiyah kepada sidang tahunan MPR pada tahun 2002, dan pada tanggal 29 Februari 2004 Hizbut Tahrir mengorganisir sekitar 20.000 masa *longmarch* dari Monas ke Bundaran Hotel Indonesia Jakarta menuntut tegaknya Syari'ah dan Khilafah.⁸⁷

Perjuangan Hizbut Tahrir nampaknya tidak sia-sia hingga pada tahun 2006 Hizbut Tahrir Indonesia berhasil mendapatkan restu pengakuan dari Negara Indonesia. Legalisasi ini memungkinkan Hizbut Tahrir Indonesia untuk bergerak leluasa tidak hanya menjangkau komunitas-komunitas Muslim dan kampus tetapi juga membangun pengaruh dilingkup birokrasi pemerintahan.

Seruan khilafah yang di usung Hizbut Tahrir Indonesia tidak hanya disuarakan di Masjid dan kampus saja, tetapi juga sudah mulai merambah dan menjangkau ruang-ruang publik yang lebih luas, seperti lewat seminar-seminar yang diadakan di hotel-hotel dan kantor-kantor instansi

⁸⁷*Ibid*

pemerintahan. Jangkauan pengaruh yang semakin luas itulah, Hizbut Tahrir Indonesia mulai percaya diri dan mulai mengupayakan tahapan terakhir menuju penegakan khilafah, yakni mencari dukungan kepada tokoh-tokoh kuat untuk bersama HTI dalam rangka mengambil alih kekuasaan.⁸⁸

Hizbut Tahrir adalah gerakan politik transnasional. Jamaah ini tidak mengenal ketua, presiden atau pimpinan dari suatu negara. Di Indonesia struktur Hizbut Tahrir yang umum digunakan oleh organisasi sosial keagamaan dengan istilah ketua umum dan yang lebih banyak tampil kepublik adalah juru bicara, struktur organisasinya sama dengan yang hendak diwujudkan seperti struktur *khilafah islamiyah* yang diperjuangkan.⁸⁹

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah dimuka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali.⁹⁰

B. Ideologi-Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berasaskan ideologi Islam yang diyakini oleh para anggotanya, yaitu dalam segala interaksi yang ada,

⁸⁸ *Ibid.* h.44

⁸⁹ Syarifuddin Jurdi, "*Pemikiran Politik Islam Indonesi*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 101.

⁹⁰ Abdul Kalim Zllum, "*Mengenal Sebuah Gerakan di Timur Tengah*," (Jakarta: Khilafah, 1993), h.8.

dengan demikian umat akan terbebas dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, cengkraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari negeri Islam. Hizbut Tahrir menggunakan ide-ide Islam, dimana ide-ide menjadi jiwa, inti dan sekaligus menjadi sebagai rahasia kelangsungan kelompoknya. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah Ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak ditengah-tengah umat, dan membimbing mereka untuk mendirikan kembali khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah SWT.⁹¹

Di Indonesia sendiri mereka tidak mendaftarkan diri sebagai secara formal sebagai partai politik yang mengikuti pemilu. Menurut mereka penegakan khilafah untuk mengembalikan kedaulatan ditangan Allah lebih penting dan utama untuk direalisasikan dari pada masalah akidah. Dan arti politik menurut Hizbut Tahrir adalah upaya memelihara urusan umat, baik dalam urusan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh pihak negara dan umat. Negara yang langsung terjun mnegurusi umat dan yang akan memonitor serta mengkoreksi Negara. Hizbut Tahrir belum disahkan oleh pemerintah Indonesia.⁹²

Sebagai gerakan politik yang berideologi Islam, Hizbut Tahrir Indonesia memiliki pemikiran, tujuan dan aktivitas. Dasar pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia adalah pemikiran Islam. Pemikiran itu meliputi akidah Islam, dan hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa setiap pemikiran telah disampaikan Hizbut Tahrir diadopsi dari sejumlah pemikiran dalam aktivitas

⁹¹ *Ibid*

⁹² Meila Isktrila, "Pembubaran Ormas HTI Dalam Perspektif Siyash", (Skripsi UIN RIL). h. 47

yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan Islami serta mengembangkannya dakwah Islam dengan mendirikan Khilafah. Mereka menjelaskan setiap pemikiran yang diadopsi dalam berbagai buku dan pamflet serta menjelaskan dalil yang terperinci dari setiap hukum, pendapat, pemikiran dan konsep.

Hizbut Tahrir bertujuan mengembalikan Muslim ke *dar al-islami* dan masyarakat Islam. Dengan kata lain, seluruh urusan kehidupan dijalankan sesuai dengan hukum-hukum syariat dibawah naungan negara Islam, sebuah negara yang dipimpin oleh seorang Khilafah yang dibaiat untuk menerapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah serta mengemban risalah keseluruhan dunia dengan jihad.⁹³

Ideologi transnasionalisme Hizbut Tahrir Indonesia lebih merepresentasikan pergerakan “sentrifugalisme” Islam, dimana visi politiknya adalah menyatukan identitas-identitas Islam nasional dan lokal yang berserak diseluruh dunia dibawah otoritas tunggal *Khilafah Islamiyah*. Doktrin tersebut diakui oleh para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia sebagai antithesis ideologis yang siap menandingi, bahkan mengganti, posisi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah dianggap final di Indonesia.⁹⁴

Hizbut Tahrir Indonesia mengarahkan interaksi perjuangan bersama dengan umat untuk meraih apa yang dicita-citakannya untuk menentang penjajahan budaya asing. Latar belakang berdirinya gerakan ini, tidak jauh berbeda dengan tujuan masuk dan berdirinya gerakan ini, di Indonesia. Secara teologis, ia didirikan untuk memenuhi seruan Allah yang merupakan alasan

⁹³ Nilda Hayati, *Op. Cit*, h.6-7

⁹⁴ Meila Iskatri, “Pembubaran Ormas HTI Dalam Perspektif Siyasah”, (Skripsi UIN RIL). h. 67

utama yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir. Salah satu alasan utama yang melatar belakangi keinginan untuk mendirikan Khilafah adalah pandangan mereka yang menganggap seluruh sistem kehidupan saat ini, termasuk yang digunakan oleh kaum Muslim sekalipun, sangat jauh dari cita-cita Islam bahkan berlawanan.

Motivasi semacam ini, gagasan kelompok ini wajar jika berada pada jalur non-mainstream, salah satunya adalah pandangan yang kontra dengan dasar negara yang berlaku di Indonesia. Yakni sistem demokrasi dan Pancasila. Terlihat bagaimana seluruh pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia, dipenuhi dengan keritikan yang sangat tajam dan frontal terhadap sistem pemerintahan Indonesia.⁹⁵

Idealisme Hizbut Tahrir Indonesia berkisar kepada kewajiban untuk mengembalikan segala urusan kepada syariat Islam. Hizbut Tahrir Indonesia dengan gagasan Khilafahnya tampil sebagai anti tesis terhadap ideologi demokrasi dan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Hal macam ini jelas terlihat dari alur pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang semangat mengkritis kebijakan pemerintah Indonesia yang sah dan memandangnya sebagai sebuah sistem yang gagal. Sebagai jawaban, mereka selalu menawarkan solusi Khilafah dalam setiap permasalahan nasional yang terjadi.⁹⁶

Menurut keyakinan Hizbut Tahrir Indonesia, hukum Islam mustahil untuk bisa diterapkan dengan sempurna kecuali dengan adanya Khilafah (Negara Islam) dan seorang Khalifah yang akan menerapkan Islam kepada Muslim

⁹⁵ Nilda Hayati. *Op.Cit*, h. 13

⁹⁶ "Hizbut Tahrir Indonesia" (On-Line), tersedia di:
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/HizbutTahrir> .(15 Juni 2019)

dibaiat untuk didengar dan ditaati perintahnya atas dasar Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Mengembalikan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islam merupakan batasan tujuan berdirinya Hizbut Tahrir indonesia.⁹⁷

C. Ajaran Politik Hizbut Tahrir

Ketika Rasulullah Muhammad SAW menjelang wafat, beliau bersabda, ‘*Aku akan meninggalkan kalian semua*’. Oleh karena itu, beliau memberikan dua pusaka sebagai peninggalan untuk umat Islam sebagaimana sabda berikut;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي رَكْتُ
فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَ هُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya: “*Sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat setelahnya yaitu kitab Allah dan Sunnahku*” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Menurut KH. Ahmad Hasyim Muzadi, meskipun dua pusaka tersebut sudah berhasil disampaikan kepada para sahabat, tapi terdapat dua hal lagi yang belum dapat tersampaikan, yakni; *Pertama*, sahabat yang akan menjadi penggantinya. *Kedua*, model proses pengantiannya. Implikasi dan ketidakjelasan dua hal tersebut proses pemakaman Rasulullah Muhammad mundur sampai hari rabu sore, padahal beliau wafat pada hari senin.⁹⁸

KH. Ahmad Hasyim Muzadi menilai bahwa masalah khilafah ini memang masalah yang krusial, karena khilafah berdampak langsung pada kepemimpinan (kekuasaan dan prosesnya), politik dan hukum Islam.⁹⁹

Hamdani Anwar menjustifikasi bahwa masalah kepemimpinan merupakan

⁹⁷ Meila Iskatrialia, “Pembubaran Ormas HTI Perspektif Siyasah” (Skripsi UIN RIL), h.48.

⁹⁸ Sofiudin, “*Gerakan Politik Hizbut Tahrir Akankah Menjadi Gerakan Dakwah*” (Tangerang: Pustaka Kompas, 2017), h. 11.

⁹⁹ *Ibid.*

suatu hal yang sangat mudah sekali menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Konflik yang terjadi dalam tubuh umat Islam juga disebabkan oleh masalah-masalah tersebut, sebagai akibatnya yaitu perpecahan diantara mereka akan mudah sekali terjadi. Apabila jarak pandangannya mengarah pada tinjauan historis, maka konflik internal dikalangan umat Islam terkait kepemimpinan sesungguhnya telah terjadi juga sejak masa al-Khulafa' al Rashidin.¹⁰⁰ Pembagian negara Islam berdasarkan batasan akidah meliputi; Dar al-Islam, Dar al-Harb, Dar al-sulh dan Muslim State (al-Billad al-Islamiyah), yaitu dimana suatu negara mayoritas rakyatnya beragama Islam.

Polarisasi bentuk negara menjadi Dar al-Islam dan Dar al-harb sebenarnya tidak memiliki rujukan yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun Hadist, tetapi pembagian ini dibuat oleh fuqaha yang di antara tujuannya adalah untuk mengatur persoalan umat Islam.¹⁰¹ Bermula dari sejarah Madinah, istilah Dar al-Islam atau Daulah Islam mempunyai rujukan sejarah, sehingga dalam perspektif fiqh Dar al-Islam didefinisikan sebagai negara yang berdasarkan kesatuan politik yang meliputi semua wilayah Islam. Istilah ini pun pernah di ungkapkan oleh Khalid bin Walid ketika diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar ketika mengajak kaum Hirah untuk memeluk Islam.¹⁰²

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, kekuatan-kekuatan Islam harus membangkitkankembali umat Islam dari kemerosotan dalam berbagai dimensi kehidupan, rmembebaskanumat dari pemikiran-pemikiran dan sistem perundang-undangan yang tidak Islami, sertamembebasan mereka dari

¹⁰⁰*Ibid.h. 12*

¹⁰¹*Ibid.h.13*

¹⁰²*Ibid*

cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara sekuler. Negara-negara di dunia, termasuk Islam, tengah mempraktikkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang menurut pandangan Hizbut Tahrir sudah jauh dari misi Islam. Artinya negara-negara muslim sudah banyak meniru pola kehidupan masyarakat Barat yang tidak Islami dan mengadopsi sistem hukum yang tidak bersumber dari Islam. Kondisi semacam inilah yang menurut Hizbut Tahrir harus diperhatikan oleh kekuatan-kekuatan Islam agar pemerintahan dikendalikan dengan sistem hukum Islam dan menentang segala bentuk undang-undang serta pikiran-pikiran yang kufur.

Dengan menolak segala macam hegemoni Barat, Hizbut Tahrir memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikrah dan thariqah. Semua ide, pendapat dan hukum yang hanya berasal dari Islam. Segala sesuatu yang tidak berasal dari Islam bukan merupakan bagian dari setiap sikap dan pandangan Hizbut Tahrir.¹⁰³

Seluruh gagasan yang muncul dari Hizbut Tahrir hanya bersumber dari Islam, sesuatu yang tidak Islami pasti tidak laku dan tidak menjadi pedoman dalam Hizbut Tahrir. Pendirian Hizbut Tahrir yang tegas ini merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian dari gerakan politik dan cita-cita untuk mendirikan khilafah Islamiyah, yakni kepemimpinan tunggal umat Islam, setelah khilafah Islamiyah di Turki Ustmani dihancurkan oleh kekuatan kapitalisme Barat.¹⁰⁴

¹⁰³ Jurnal Dakwah-Dakwah dan Komunikasi. STAIN Purwokerto, Komunika. Vol.6.1. Januari-Juni 2012 pp.

¹⁰⁴ Jurnal Dakwah-Dakwah dan Komunikasi. STAIN Purwokerto, Komunika. Vol.6.1. Januari-Juni 2012 pp

Untuk mewujudkan ide-ide, gagasan dan pandangannya, Hizbut Tahrir menempuh cara-cara politik dan tidak dengan cara-cara yang lain. Cara politik efektif untuk mencapai tujuan terbentuknya khilafah Islamiyah. Sasaran utama dari jalan yang ditempuh ini merupakan usaha untuk mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat agar mereka menerima, mengamalkan dan turut mengembangkannya agar bisa segera terwujud dalam aspek pemerintahan dan realitas kehidupan. Tugas tersebut merupakan kewajiban setiap muslimin baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana kewajiban yang sama telah dilaksanakan oleh para pemimpin Islam sebelumnya. Tugas tersebut juga merupakan tugas bersama kaum muslimin di seluruh dunia.¹⁰⁵

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam merupakan ideologi bagi negara, bagi masyarakat dan bagi kehidupan umat manusia. Islam adalah bagian integral yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Islam juga telah memerintahkan untuk mendirikan suatu negara dan pemerintahannya dan memerintah dengan hukum-hukum Islam dan bukan hukum buatan manusia yang tidak bersumber pada Islam.¹⁰⁶

Dalam konteks Indonesia, Hizbut Tahrir baru pada tingkat gerakan moral politik yang dilakukan dalam berbagai kegiatan terutama melalui tablig akbar dan demonstrasi. Dua hal ini merupakan cara Hizbut Tahrir menyuarakan gagasan politik Islamnya. Menurut salah seorang pengurusnya, Hizbut Tahrir tidak akan menjadi partai politik untuk saat ini di Indonesia, tetapi akan berjuang secara ekstra parlemen. Kelembagaan politik Indonesia

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*

menurutnya menyulitkan sekaligus tidak efektif bagi Hizbut Tahrir untuk memperjuangkan gagasan khilafah Islamiyah, bahkan muncul "ketakutan" akan terjerumus ke dalam kepentingan-kepentingan politik sesaat yang justru akan mengurangi bobot perjuangan Islam di masa depan.

Konsep pemerintahan Islam akan terus diperjuangkan meski saat ini masih bersifat ekstra parlementer dengan menggelar seminar dialog, diskusi, tablig akbar, demonstrasi dan rapat-rapat umum. Gerakan ini tidak bersifat lokal tetapi menyebar ke seluruh belahan dunia. Pendiri jama'ah Hizbut Tahrir, Taqiyuddin an-Nabhani telah meninggalkan beberapa konsep pemerintahan Islam yang oleh pengikutnya akan terus diperjuangkan hingga terealisasi.¹⁰⁷

Hizbut Tahrir Indonesia masih memprioritaskan pembinaan jama'ah, menurut salah seorang yang aktif dalam Hizbut Tahrir, suatu saat Hizbut Tahrir Indonesia akan menjadi kekuatan politik resmi untuk dapat memperjuangkan cita-cita politiknya. Hizbut Tahrir merupakan fenomena baru yang menarik untuk dikaji, mengingat gagasan dan praksisnya berbeda dengan kebanyakan jama'ah lain yang pernah ada di Indonesia.¹⁰⁸

Disebut demikian, karena agenda-agenda politik yang diperjuangkan oleh jama'ah ini berdasarkan tradisi Islam periode awal sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi, khalifah Rasyidin, khilafah dalam dinasti Muawiyah dan Abbasiyah hingga khilafah Turki Ustmani yang ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Attaturk pada 1924. Jama'ah ini meletakkan dasar perjuangan pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi seperti

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*

juga jama'ah-jama'ah Islam lainnya. Untuk membangkitkan, menyadarkan, mendidik umat serta menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, Hizbut Tahrir harus merujuk sepenuhnya kepada Al-Qur'an dan Sunnah, apalagi untuk memperjuangkan terbentuknya daulah Islamiyah.

Bagi Hizbut Tahrir, berjuang menegakkan Islam merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh umat Islam, karena Nabi telah berhasil menegakkan Islam dan memperluas pengaruhnya selama lebih kurang sepuluh tahun di Madinah dan pada masa itu umat Islam telah banyak dan wilayah kekuasaan Nabi yang berpusat di Madinah telah meluas dan hampir mencakup seluruh jazirah Arabia. Bangunan Kota Madinah dilandasi oleh tiga pilar yaitu pemikiran (*fikriyah*), politik (*siyasah*) dan tanpa kekerasan (*la maadiyah*). Keberhasilan Rasulullah membangun umat di atas pluralisme agama di Madinah merupakan representasi konkret betapa Islam dapat memberikan alternatif yang paling aman, damai bagi seluruh umat manusia.¹⁰⁹

D. Gerakan-Gerakan Politik HTI di Indonesia

Semenjak datangnya Hizbut Tahrir ke Indonesia, aktivitas berjalan secara tertutup selama 10 tahun. Hal ini disebabkan karena Hizbut Tahrir lahir dibawah pemerintahan rezim Soeharto yang melarang segala bentuk gerakan yang tidak berideologi Pancasila. Pasca reformasi Hizbut Tahrir bisa melakukan aktivitas secara terbuka hal ini ditandai dengan diadakannya diskusi terbuka tentang syariah ke berbagai daerah seperti ke beberapa daerah lain di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Mereka juga aktif menyebarkan

¹⁰⁹ Jurnal Dakwah-Dakwah dan Komunikasi. STAIN Purwokerto, Komunika. Vol.6.1. Januari-Juni 2012 pp

gagasan Khilafah keberbagai Perguruan Tinggi melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Namun demikian perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia masih dalam proses pengembangan kader dan pembinaan umat dalam rangka memperkuat tubuh partai.¹¹⁰

Dalam melancarkan gerakannya mereka menggunakan proses dakwahnya berjenjang, Hizbut Tahrir melakukan berbagai upaya yang sistematis bagi terlaksananya sebuah kehidupan masyarakat yang lebih Islami. Hizbut Tahrir menetapkan tiga tahapan dalam proses berdakwahnya yaitu, *pertama*, tahap tahap pembinaan dan pengkaderan yaitu untuk melahirkan orang-orang yang meyakini Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. *Kedua*, tahap berinteraksi dengan umat agar mampu mengembangkan dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berupaya menerapkannya dalam realitas kehidupan. *Ketiga*, tahap pengambil alih kekuasaan untuk menerapkan Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebarkan risalah Islam keseluruh dunia.¹¹¹

Berbagai upaya Hizbut Tahrir lakukan dalam mengembangkan dakwahnya dan mengkomunikasikan pemahaman mereka mengenai Islam, baik melalui dakwah secara langsung seperti dengan ceramah dan khutbah maupun yang memanfaatkan media cetak dan media elektronik. Telah banyak buku, selebaran maupun pamflet yang di sebar di berbagai masjid yang ditulis oleh tokoh sentral, yaitu Syekh Taqiuddin Al-Nabhani dan tokoh Hizbut

8. ¹¹⁰ Meila Iskatrilia, "Pembubaran Ormas HTI Perspektif Siyasah" (Skripsi UIN RIL), h. 4

¹¹¹ *Ibid*

Tahrir Indonesia lainnya yang berisi himbauan membangun Khilafah dan mengatakan syariat Islam.

Selain disebarkan di berbagai masjid, berbagai karya tulis diterbitkan dalam bentuk buku, majalah dan buletin. Media elektronik juga mereka manfaatkan dalam upaya merealisasikan Indonesia menuju negar Khilafah Islamiyah, seperti melalui radio Hizbut Tahrir Indonesia, TV Hizbut Tahrir Indonesia serta melalui internet dengan situs resmi Hizbut Tahrir Indonesia. Situs yang merupakan website resmi Hizbut Tahrir Indonesia yang dapat diakses, yang didalamnya berbagai bentuk tulisan baik berita, opini, majalah, buku, serta foto, audio dan video yang menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia terutama dalam mewujudkan berdirinya Indonesia sebagai negara Khilafah Islamiyah dan menegakkan tuntutan syariat Islam yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Hadist.¹¹²

Pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia bermanifesto dalam berbagai unsur yang terlibat didalamnya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang terlibat didalamnya, kerangka dasar yang menjadi acuan adalah bahwa seluruh sendi pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia, termasuk gagasan besarnya tentang Khilafah merupakan sebuah kristalisasi dari berbagai resepsi mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Seluruh gerakan Hizbut Tahrir Indonesia berpijak diatas cita-cita mengembalikan Khilafah Islamiyah dan kembali mengimplementasikan hukum Islam secara keseluruhan. Hal tersebut

¹¹²*Ibid, h. 5.*

sebagaimana tercermin dalam motto Hizbut Tahrir Indonesia “untuk melanjutkan kehidupan Islam”.¹¹³

E. Proses Pembubaran HTI dan Dasar Hukumnya

Begitu bahayanya Hizbut Tahrir Indonesia sehingga pemerintah Indonesia dengan cepat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dimana syarat utama menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karena keadaan mendesak yang berpotensi merusak atau bahkan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fenomena pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia cukup menguras energi pemerintah, termasuk kalangan Ahli Hukum bahkan Ulama dan Kyai dari berbagai Ormas Islam diluar Hizbut Tahrir Indonesia. Meskipun Hizbut Tahrir dirancang sebagai organisasi politik, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu. Sebab menurut aktivitasnya, dalam situasi sekarang ini banyaknya partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu partai ini tidak mengikuti jejak partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu dan kemudian dapat menjadi anggota legislatif.¹¹⁴

Maksud dan tujuan pemerintah dalam menerbitkan PerPPU Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang mematuhi dan

¹¹³ *Ibid.* h. 10.

¹¹⁴ Meila Iskatrilia, “Pembubaran Ormas HTI Perspektif Siyasah” (Skripsi UIN RIL), h.

konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang telah memisahkan kedua golongan Ormas tersebut dan disertai dengan jenis sanksi dan penerapan yang bersifat luar biasa.¹¹⁵

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia, dengan demikian Hizbut Tahrir Indonesia resmi dibubarkan pemerintah. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. “Maka dengan mengacu pada ketentuan PerPPU tersebut terhadap status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia dicabut”, ujar Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham Jakarta.

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Freddy mengatakan, Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau kemasyarakatan (Ormas). Disamping itu, Kemenkumham juga berwenang mencabut status tersebut “khususnya yang berseberangan dengan Ideologi dan hukum negara Indonesia” kata Freddy. “Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum Hizbut

¹¹⁵ PerPPU Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, (Jakarta: Buana Ilmu Populer), h.16.

Tahrir Indonesia, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan PerPPU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A,” tambah Freddy.¹¹⁶

Pemerintah sebelumnya menerbitkan PerPPU Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. PerPPU ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap anti-Pancasila. Dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, upaya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia telah melalui satu proses pengakjian yang panjang. Wiranto saat itu memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia:

1. Sebagai ormas berbadan hukum, Hizbut Tahrir Indonesia tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Hizbut Tahrir Indonesia terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
3. Aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

¹¹⁶ Kompas.com, “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah” (On-line) tersedia di : <http://www.kompas.com/hti/resmi/dibubarkan/> (20 Juni 2019)

Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, tutur Wiranto saat itu. Belakangan pemerintah tidak mengambi jalur pengadilan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, tetapi memilih langkah menerbitkan PerPPU dengan mengubah sejumlah aturan dalam UU Ormas. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubran ormas harus melalui pengadilan. Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hizbut Tahrir Indonesia sudah mengajukan uji materi PerPPU Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran gugatan dilakukan pada Selasa, Juli 2017 sore dengan didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra. Yusril menjelaskan melalui gugatan tersebut pihaknya bermaksud untuk membatalkan beberapa pasal yang berpotensi multitafsir. Selain itu terdapat ketidakjelasan mengenai definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Draf PerPPU sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Selanjutnya, akan dibahas oleh 10 fraksi, akan diterima atau ditolak menjadi Undang-Undang.¹¹⁷ Akan tetapi pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Ini masih menjadi perdebatan ada yang setuju dan ada yang tidak tentang penerbitan Peraturan

¹¹⁷ Kompas.com, “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah” (On-line) tersedia di : <http://www.kompas.com/hti/resmi/dibubarkan/> (20 Juni 2019)

Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan status pembubaran terhadap Ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

Disini penulis akan memaparkan beberapa pandangan para tokoh tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia:

1. Moh Mahfud MD

Menurut beliau, memang agak problematik secara yuridis karena pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia atau Ormas itu kan melalui peringatan terlebih dahulu. Peringatan satu, dua, tiga, sampai enam kali peringatan. Baru dihentikan bantuannya, kalau tidak ada bantuannya dihentikan kegiatannya, kemudian diminta putusan pengadilan agar dicabut badan hukumnya. Itu yuridisnya. Itu memang sekarang menjadi problema karena instrumen hukum yang ada tidak bisa langsung membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia seperti sekarang.

Tetapi kalau kembali ke filosofinya, kenapa dulu menggunakan peringatan-peringatan itu kan sebenarnya kegiatan tindakan fisik, bukan tindakan filosofis. Kalau aturan fisik dibuat karena dahulu orang suka melakukan sweeping, kalau besok sweeping lagi, besok kamu diperingatkan. Melanggar lagi diperingatkan, itu yang tindakan fisik. Ternyata, Hizbut Tahrir Indonesia langsung masuk ke filosofisnya, tidak melakukan tindakan yang bisa diperingatkan. Itu sudah pernyataan jati diri

bahwa dia berjuang untuk mendirikan khilafah, itu pernyataan yang sangat nyata dan disampaikan kemana-mana secara terbuka.¹¹⁸

2. Busyro Muqoddas

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas menilai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia tidak transparan dan tidak berdasarkan negara hukum. Pemerintah belum pernah menggelar dialog terkait dengan Hizbut Tahrir Indonesia. “Pembubaran Hizbut tahrir Indonesia dicabut badan hukumnya apakah pemerintah pernah dialog? Apakah Menteri Agama pernah mendiskusikan ke media soal ideologi Hizbut Tahrir Indonesia yang kalau tidak sesuai Pancasila seharusnya dibubarkan di pengadilan,” ujar Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta.¹¹⁹

Seharusnya kata Busyro apabila terjadi persoalan dapat diselesaikan melalui pengadilan dan bukan secara sepihak oleh pemerintah. Sebab, pengadilan merupakan pilar negara yang berwenang memutuskan perkara hukum. Apabila hal itu tidak dilakukan, pemerintah dianggap fasisme. Ia menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Masyarakat merefleksikan kekhawatiran yang berlebihan dari pemerintah terhadap satu organisasi bernama Hizbut tahrir

¹¹⁸ Fathoni, NU Online, Pandangan Moh Mahfud MD Soal Pembubaran HTI (On-line) tersedia di: <https://www.nuonline.com> (21 Juni 2019)

¹¹⁹ Liputan6.com, Pandangan Tokoh Muhammadiyah soal Pembubaran HTI, (On-line) tersedia di : <https://liputan6.com/pandangan/tokoh/muhammadiyah/tentang/pembubaran/hti> (21 Juni 2019).

Indonesia. “Kekhawatiran tidak di implementasikan dalam langkah dialogis, melainkan cara refresif”, ucap dia.¹²⁰

3. KH. Said Aqil Siradj

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj menegaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia karena memiliki pandangan yang bertentangan dengan Pancasila. “Kami bersama 12 organisasi keagamaan lainnya pendapatnya sama, menolak kehadiran Hizbut Tahrir di Indonesia. Organisasi yang merongrong Pancasila, tidak menghormati kebhinekaan, tidak menghormati Undang-Undang Dasar 1945, harus dibubarkan,” tutur Said Aqil.

Menurut Said Aqil, semua pihak patut menjunjung tinggi bentuk negara Indonesia yang berupa negara kesatuan dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Ia menjelaskan bahwa sesungguhnya agama Islam tidak mengatur secara khusus mengenai masalah perpolitikan dan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menurutnya, diputuskan dengan cara ijtihad yaitu upaya untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. “Sistem perpolitikan menurut ahlussunah waljamaah itu melalui ijtihadiyah. Tidak harus bersistem kerajaan, khilafah atau republik, yang

¹²⁰ Liputan6.com, Pandangan Tokoh Muhammadiyah soal Pembubaran HTI, (On-line) tersedia di : <https://liputan6.com/pandangan/tokoh/muhammadiyah/tentang/pembubaran/hti> (21 Juni 2019).

penting harus berkeadilan, hukum ditegakkan, sejahtera. Itu saja,” ungkap beliau.¹²¹

Menurut ulama fiqh siyasah, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Dengan demikian, hubungan antara kedua belah pihak berbedbeda pada masing-masing negara, sesuai dengan perbedaan masing-masing negara . Akan tetapi, karean adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, karena pemerintah memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintah bersikap absolut otoriter terhadap rakyat yang di pimpinnya. Mereka berlaku sewenang-sewenang dan melanggar hak-hak asasi rakyatnya . Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa secara absolut tersebut.¹²²

Sumber tertulis utama pembentukan Undang-Undang Dasar dalam Islam Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, karena memang buku undang-undang, Al-Qur'an tidak merinci lebih jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dan rakyatnya serta hak dan kewajiban mereka masing-masing. Al-Qur'an hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum pemerintahan Islam secara global saja. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tata pemerintahan juga tidak banyak. Ayat-ayat yang masih global ini

¹²¹ Tempo.com, “Nahdlatul Ulama,” (On-line) tersedia di:
<http://tempo.com/pembubaran/HTI/bukan/pembatas/dakwah/islam> (21 Juni 2019).

¹²² Moh.Ikbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2014). h. 179

kemudian dijabarkan oleh Nabi dalam Sunnahnya, baik berbentuk perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan. Namun demikian, penerapannya pun bukan “harga mati”. Al-Qur’an dan Sunnah menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun kontitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam hal ini, dasar-dasar hukum Islam lainnya, seperti *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *urf* memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi.¹²³

Menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan tergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi syariat. Sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat yang dipimpinnya. Salah satu kaidah fiqh yang sangat populer dikalangan umat Islam mengatakan:¹²⁴

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan”

¹²³ *Ibid.* h. 180-181

¹²⁴ Afifuddin Muhajjir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017). h. 91

Kaidah tersebut dikemukakan oleh Imam Syafi'i dengan ungkapan lain sebagai berikut:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Posisi pemimpin terhadap rakyatnya sama dengan posisi pengasuh anak yatim terhadap anak yatim asuhannya”

Kaidah tersebut mengacu kepada pernyataan Sayyidina Umar bin Khathab Ra, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ وَإِنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Aku memosisikan diriku dari harta Allah (harta publik) layaknya pengasuh anak yatim (dari harta anak yatim). Jika aku membutuhkannya maka aku mengambil sekadarnya. Jika kemudian aku punya maka aku mengembalikannya. Dan, andai tak membutuhkannya maka aku menahan diri (dari mengambilnya)”

Penyebutan imam dalam kaidah tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk pemimpin tertinggi, seperti khalifah atau presiden, tetapi juga mencakup semua orang yang memiliki otoritas seperti gubernur, bupati, anggota parlemen dan sebagainya. Merekalah pemegang amanah rakyat maka mereka harus bekerja demi kemaslahatan rakyat.¹²⁵

¹²⁵ *Ibid*, h. 93

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pandangan Hukum Islam dan Proses Pembubaran Hizbut Tahrir

Indonesia di Indonesia dan Pandangan Para Tokoh

Berdasarkan data yang menjadi pembahasan dan permasalahan yang menjadi penelitian penulis adalah mengenai dibubarkannya Organisasi Masyarakat berbasis Islam Hizbut Tahrir Indonesia. Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia pada tahun 1983 bermula dari Ustad Mamak Abdullah bin Nuh. Pengelola pondok pesantren Al-Ghazali, Bogor yang juga staf pengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini, mengajak ustad Abdurrahmad Al-Baghdadi untuk menetap di Bogor, merupakan anggota Hizbut Tahrir dari Yordania, yang merupakan hasil perluasan wilayah oleh Hizbut Tahrir pusat di Yordania. Pada saat inilah, Al-Baghdadi berinteraksi dengan para aktivis Islam di masjid Al Ghifari, dan di IPB.

Pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir yang diperkenalkan Al-Baghdadi , rupanya mampu menarik perhatian aktivis masjid kampus ini. Mulailah dibuat halaqah-halaqah kecil untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Hizbut Tahrir. Dibuatnya buku-buku tentang Hizbut Tahrir, dan lainnya pun mulai dikaji dengan serius. Melalui jaringan lembaga dakwah kampus inilah, ajaran-ajaran Hizbut Tahrir menyebar kekampus-kampus diluar Bogor seperti Unpad, IKIP Malang, Unair, Unhas dan akhirnya menyebar keseluruh Indonesia.

Pada tahun 2000 Hizbut Tahrir muncul dimuka publik Indonesia dengan menyelenggarakan konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Senayan Jakarta yang dihadiri 5000 orang.

Terhadap permasalahan dalam negeri Hizbut Tahrir pernah memimpin sekitar 12 ribu masa *longmarch* dari Monas ke Senayan menuntut penerapan syari'ah Islamiyah kepada sidang tahunan MPR pada tahun 2002, dan pada tanggal 29 Februari 2004 Hizbut Tahrir mengorganisir sekitar 20.000 masa *longmarch* dari Monas ke Bundaran Hotel Indonesia Jakarta menuntut tegaknya Syari'ah dan Khilafah.

Perjuangan Hizbut Tahrir nampaknya tidak sia-sia hingga pada tahun 2006 Hizbut Tahrir Indonesia berhasil mendapatkan restu pengakuan dari Negara Indonesia. Legalisasi ini memungkinkan Hizbut Tahrir Indonesia untuk bergerak leluasa tidak hanya menjangkau komunitas-komunitas Muslim dan kampus tetapi juga membangun pengaruh dilingkup birokrasi pemerintahan. Seruan khilafah yang di usung Hizbut Tahrir Indonesia tidak hanya disuarakan di Masjid dan kampus saja, tetapi juga sudah mulai merambah dan menjangkau ruang-ruang publik yang lebih luas, seperti lewat seminar-seminar yang diadakan di hotel-hotel dan kantor-kantor instansi pemerintahan. Dengan jangkauan pengaruh yang semakin luas itulah, Hizbut Tahrir Indonesia mulai percaya diri dan mulai mengupayakan tahapan terakhir menuju penegakan khilafah, yakni mencari dukungan kepada tokoh-tokoh kuat untuk bersama HTI dalam rangka mengambil alih kekuasaan.

Hizbut Tahrir adalah gerakan politik transnasional. Jamaah ini tidak mengenal ketua, presiden atau pimpinan dari suatu negara. Di Indonesia struktur Hizbut Tahrir yang umum digunakan oleh organisasi sosial keagamaan dengan istilah ketua umum dan yang lebih banyak tampil kepublik adalah juru bicara, struktur organisasinya sama dengan yang hendak diwujudkan seperti struktur *khilafah islamiyah* yang diperjuangkan.

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkaman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah dimuka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali.

Dalam sejarah awal pendiriannya yang penulis baca bahwa pendiri Hizbut Tahrir Taqiyuddin al-Nabhani melihat bahwa gagasan kekhalifahan tidak akan berjalan selama sekte-sekte dalam Islam dijadikan nomor satu. Al-Nabhani membayangkan, seluruh kelompok dan sekte dalam Islam akan berada dalam satu naungan yurisprudensi yang pernah dicontohkan oleh kakeknya sendiri, selama kejayaan kekhalifahan Utsmaniyah.

Di Indonesia sendiri organisasi ini sudah cukup lama beraktivitas melakukan dakwah-dakwah Islamnya tetapi pemerintah Indonesia mengejutkan publik dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dalam

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pemerintah menghapus beberapa pasal yang diantaranya mengenai pembubaran suatu Organisasi Masyarakat yang harus melalui prosedur putusan pengadilan dan harus melalui surat peringatan pertama sampai ke enam, dan setelah itu baru melalui permohonan kepada pengadilan untuk memutuskan dibubarkannya atau tidak suatu Organisasi Masyarakat tersebut.

Tindakan tegas dilakukan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mencabut status perizinan organisasi ini, berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0028.60.10.2014, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Berdasarkan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 disisipkan Pasal 80A yang berbunyi “ Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (30) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Latar belakang dibubarkannya Organisasi Masyarakat ini lantaran dinilai atas ideologi yang mereka bawa pendirian negara khilafah menjadi tujuan utama dan terbesar dari Organisasi Masyarakat ini. Menurut sumber yang

penulis baca bahwa 3 alasan pemerintah membubarkan Organisasi Masyarakat ini, yaitu:

1. Sebagai ormas berbadan hukum, Hizbut Tahrir Indonesia tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Hizbut Tahrir Indonesia terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
3. Aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Terlepas dari tiga hal itu menurut penulis Indonesia yang ber Ideologikan Pancasila menjadi alasan utama pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Sehingga tidak relevan jika ada suatu Organisasi Masyarakat di negara Indonesia yang mana negara ini sangat menjunjung persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbhineka tunggal ika yang artinya walaupun berbeda tetapi tetap satu jua hal ini yang selalu di ingat penulis dalam keutuhan hidup bernegara terutama di negara yang sangat kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi hal ini menjadi polemik dikalangan masyarakat dan para pengamat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pembubaran Organisasi Masyarakat ini, ada yang setuju

dan ada yang tidak mereka yang tidak setuju, menganggap hal ini merupakan bentuk pelanggaran dalam demokrasi yang sudah dinikmati oleh bangsa Indonesia sejak ruhtuhnya orde baru, serta ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan pembatasan Hak Asasi Manusia yaitu hak berkumpul dan berserikat.

Pandangan para tokoh mengenai pembubaran organisasi masyarakat ini terjadi perbedaan pendapat diantaranya menurut Prof. Mahfud MD, beliau mengatakan bahwa pembubaran organisasi masyarakat ini memang agak problematik mengenai prosedur hukum yang dilakukan pemerintah, tetapi beliau tidak menyalahkan pembubaran organisasi masyarakat ini karena gerakan dari organisasi ini memberikan paham melalui filosofi pendirian dari negara khilafah.

Said Aqil Siradj ketua PBNU pihaknya sangat mendukung langkah pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia karena organisasi ini memiliki pandangan yang bertentangan dengan Pancasila. Said Aqil menjelaskan semua pihak menjunjung tinggi bentuk negara Indonesia yang berupa negara kesatuan dengan Pancasila sebagai ideology negara dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional. Said Aqil juga menjelaskan bahwa agama Islam tidak menjelaskan secara khusus mengenai masalah perpolitikan dan sistem pemerintahan.

Berbicara mengenai pandangan Hukum Islam tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia berdasarkan data yang sudah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya yang mana hukum

Islam mengatur bahwa penetapan suatu hukum atau kebijakan yang dilakukan pemimpin atau lembaga negara harus berdasarkan sifat kebijakan yang dibuat apakah berdampak mufsadat atau berdampak demi kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa sumber penetapan suatu hukum atau kebijakan yang diambil dalam suatu kebijakan diantaranya seperti dalam Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi Islam tidak mengatur semuanya secara jelas karena memang bukan Undang-Undang yang mengatur secara terperinci baik bab per bab atau bahkan poin per poin dalam suatu penetapan hukum, yang dalam hal ini mengenai tentang pembubaran suatu Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia.

Menurut penulis dalam salah satu kaidah pokok fihiyyah yang sangat populer di kalangan umat Islam mengatakan bahwa "*Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan*" dari kaidah fiqh ini penulis mengambil pemahaman bahwa pemerintah membubarkan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tujuan utamanya yang ingin menjadikan Indonesia negara khilafah. Jadi jelas menurut penulis penetapan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan membubarkan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena pemerintah mengedepankan kemaslahatannya dalam penetapan hukum ini, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi negara yaitu, Pancasila yang dianggap sudah final di Indonesia.

Indonesia yang berideologikan Pancasila menjadi salah satu alasan utama pemerintah membubarkan Organisasi Masyarakat berbasis Islam Hizbut Tahrir Indonesia. Pendirian negara khilafah yang digaung-gaungkan oleh Organisasi Masyarakat ini dinilai tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ideologinya Pancasila dan sangat menjunjung khinekaan dalam kerukunan hidup bernegara.

B. Pandangan Konstitusi dan Peraturan di Indonesia Terhadap

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

Bagaimana konstitusi memandang hal ini apakah bentuk dari pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia ini menyalahi konstitusi negara Indonesia dan merupakan bentuk kesewenangan sepihak yang dilakukan pemerintah, untuk itu penulis akan memaparkan pandangan penulis mengenai hal ini. Pembubaran Organisasi Masyarakat ini memang sedikit menjadi polemik mengenai prosedur hukum yang dilakukan pemerintah dalam membubarkannya.

Pembubaran Organisasi Masyarakat ini dilakukan oleh pemerintah dengan mencabut status badan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki hak legal administrative, setelah itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang mengubah atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yang didalam Peraturan Pemerintah ini Pasal 80 A “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3)

huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Perbedaan pendapat memang terjadi terhadap pembubaran Organisasi Masyarakat ini, diantaranya mengenai pembatasan hak berkumpul dan berserikat yang sudah dijamin dalam Undang-Undang, menurut pandangan penulis mengenai hal ini pembatasan berkumpul dan berserikat yang seperti apa dulu yang harus dijamin, apakah hak berkumpul dan berserikat yang ingin mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi negara khilafah, mengubah ideologi negara Indonesia dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah juga mempersilahkan Organisasi ini untuk menggugat ke pengadilan, tetapi sampai kasasi pun gugatan Organisasi ini ditolak oleh Mahkamah Agung. Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pun berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, jadi sudah sah secara hukum dan tidak melanggar konstitusi dan 10 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyetujui Peraturan Pemerintah ini ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Tidak habis sampai disitu pemerintah pun dikritik penggunaan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap situasi belum terlalu genting mengenai kebijakan pemerintah dalam hal hak presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Penulis menanggapi hal ini apakah harus ada perang dulu di berbagai wilayah Indonesia yang diakibatkan

oleh pemahaman dan tujuan mereka dalam mendirikan negara khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, baru dapat dikatakan situasi mendesak dan genting, penulis sependapat dengan Prof. Mahfud MD yang mengatakan bahwasanya Organisasi Masyarakat ini memang tidak melakukan tindakan-tindakan fisik tetapi dari segi filosofis itu nyata disampaikan secara terbuka, itu artinya doktrin terhadap orang-orang tersebut sangat membahayakan setiap orang yang terkena doktrin dari Organisasi Masyarakat ini dalam hal ini ajakan untuk mendirikan negara Indonesia menjadi negara Khilafah karena negara Indonesia sudah final tidak bisa diganggu gugat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis skripsi yang berjudul “Pembubaran HTI Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Konstitusi” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembubaran dari Organisasi Masyarakat ini sah secara hukum Islam, hukum Islam memandang sebuah kebijakan yang diambil pemimpin dan pemerintah dalam menetapkan kebijakan harus mengedepankan kemaslahatan bagi rakyatnya. Misi utama yang digaung-gaungkan organisasi lintas negara ini adalah pendirian negara khilafah diseluruh dunia. Hal ini tidak sesuai dengan Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara dan menjunjung tinggi ke bhinekaan dan persatuan dalam kerukunan hidup bernegara. Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia di bubarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 yang lalu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengubah atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Pada Pasal 80 A pada yang menyatakan bahwa “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Para tokoh berpandangan mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ini ada yang sepakat dan ada yang tidak terhadap

proses pembubaran Organisasi Masyarakat ini hal ini wajar menurut penulis dalam mengemukakan pendapat.

2. Pembubaran Organisasi Masyarakat ini dalam pandangan konstitusi sah secara hukum, proses-proses hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat yang anti akan Pancasila sebagai Ideologi negara Indonesia dengan mencabut staus badan hukum yang dimiliki organisasi ini oleh Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia kemudian pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat sebagai tindak lanjut dari pencabutan status badan hukum Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia.

B. Saran

Banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mengetahui mengenai Organisasi Masyarakat dan belum paham bagaimana, apa, dan kenapa organisasi tersebut didirikan. Oleh sebab itu penulis dalam hal ini berangapan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat awam terutama masyarakat yang belum terlalu paham akan teknologi yang dapat sangat dimanfaatkan dalam mencari informasi dan ilmu pengetahuan. Hal-hal itu untuk menghindari kesalah pahaman terhadap Organsisasi Masyarakat yang terindikasi tidak menjalankan dan memiliki tujuan yang sama terhadap tujuan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Himmawan Utomo, *"Konstitusi", Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Abdul Kalim Zillum, *Mengenal Sebuah Gerakan di Timur Tengah*, Khilafah, (Jakarta: 1993)
- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung : Citra Ditya Bakti), 2014
- Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017)
- Ahmad Hasan Ridwan " Implikasi Hermeneutika dalam Reinterpretasi Teks-teks Hukum Islam" *AL-ADALAH Vol XIII, No. 1, Juni 2016*
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2000)
- Babdudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Bunyana Solihin, *kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016)
- Departemen pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia,"* Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah :Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)
- Fathoni, NU Online, Pandangan Moh Mahfud MD Soal Pembubaran HTI, Diakses pada tanggal 21 Juni 2019
- H. A. Djazuli , *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*, (Jakarta : Hizbut Tahrir, 2009)
- Hizbut Tahrir. *Diakses pada tanggal 15 Juni 2019*
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir/17.12/2018.14.02
- Jurnal Dakwah-Dakwah dan Komunikasi. STAIN Purwokerto, Komunika.Vol.6.1. Januari-Juni 2012 pp.
- Kompas.com, "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah" diakses pada tanggal 20 Juni 2019
- Liputan6.com, Pandangan Tokoh Muhammadiyah soal Pembubaran HTI, Di akses pada tanggal 21 Juni 2019.
[m.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama/18.06.2019/14:06](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama/18.06.2019/14:06).
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Meila Iskatri, "Pembubaran Ormas HTI Dalam Perspektif Siyasah", (Skripsi UIN RIL), Fakultas Syariah, 2018
- Moh.Ikbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2014).
- Mohammad Hatta, dalam Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Mohammad Nuruzzaman, *Catatan Hitam Hizbut Tahrir*, (Yogyakarta, Belibis Pustaka, 2017)

- Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. 1, No. 1 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2000)
- Muslim.or.id. (On-line), tersedia di <http://muslim.or.id/21379-hukum-organisasi-dan-taat-pada-pimpinan-organisasi.html>, (19 April 2019)
- Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran Ormas*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)
- Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia", *episteme*, vol 12 No. 1 (Juni 2017), diunduh pada tanggal 15 Agustus,
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980)
- Sofiuddin, *Gerakan Politik Hizbut Tahrir Akankah Menjadi Gerakan Dakwah*, (Tangerang: Pustaka Kompas, 2017)
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1980)
- Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015),
- Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Tempo.com, Nahdlatul Ulama, Pembubaran HTI Bukan Pembatas Dakwah Islam. Di akses pada tanggal 21 Juni 2019
- Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- W.M Susiloeati, *Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Ditinjau Daru UU No.8 Tahun 1995*, Tesis Program Pasca Sarjana Unpad, Bandung, 1997
- Zuhraini, "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila" *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni 2014